



# LAPORAN KINERJA TAHUN 2018

**Badan Informasi  
Geospasial**



**BADAN INFORMASI  
GEOSPASIAL**

## PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Informasi Geospasial untuk Tahun Anggaran 2018 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja, Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Informasi Geospasial.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Cibinong, 26 Februari 2019

Inspektur



Sugeng Prijadi

NIP. 19590309 198703 1 002

# LAPORAN KINERJA TAHUN 2018

---

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL



## KATA PENGANTAR

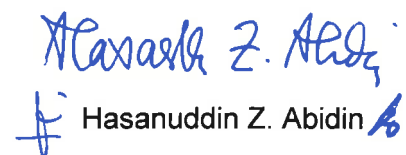
Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja (LAKIN) Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2018 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Laporan kinerja BIG disusun sebagai pertanggungjawaban organisasi kepada seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan tugas dan fungsi kami di bidang Informasi Geospasial (IG). Laporan kinerja ini juga sebagai pertanggungjawaban BIG terhadap pencapaian sasaran strategis yang telah dituangkan dalam dokumen perjanjian kinerja BIG tahun 2018.

Penyusunan LAKIN BIG 2018 merupakan amanah dari 3 (tiga) peraturan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum capaian kinerja BIG tahun 2018 telah sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. Berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang ditargetkan berhasil dilaksanakan dengan baik serta mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Keberhasilan capaian tersebut tidak lepas dari kerja keras seluruh entitas BIG dan *stakeholders* selama tahun 2018 dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Memang dapat dikatakan bahwa beberapa capaian kinerja BIG tahun 2018 masih ada yang belum maksimal, namun akan terus ditingkatkan dan diperbaiki demi penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG) yang lebih baik.

Akhir kata, semoga LAKIN BIG 2018 ini dapat memenuhi harapan bagi seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan IG dalam menentukan kebijakan. Dan kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas, dan saling mendapat *feedback* demi perbaikan dan peningkatan kinerja kami dibidang IG kedepannya. Masukan dan saran dari seluruh kalangan sangat kami harapkan demi terciptanya peningkatan kinerja di lingkungan BIG.

Cibinong, Februari 2019  
Kepala Badan Informasi Geospasial

  
Hasanuddin Z. Abidin

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	2
1.3. Tugas dan Fungsi BIG .....	2
1.4. Struktur Organisasi .....	3
1.5. Sumber Daya Manusia BIG .....	4
1.6. Potensi, Permasalahan dan Isu-Isu Stretegis Penyelenggaraan IG .....	7
1.7. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja.....	8
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>9</b>
2.1. Rencana Strategis BIG 2015-2019 .....	9
2.2. Penetapan Kinerja BIG Tahun 2018 .....	12
2.3. Alokasi Anggaran.....	13
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>14</b>
3.1. Analisis Capaian Kinerja Organisasi .....	14
3.2. Analisis Capaian Setiap Sasaran Strategis .....	17
3.2.1. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kontribusi IG Sesuai Kebutuhan Pembangunan Nasional dan Masyarakat.....	17
3.2.2. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Mendukung Penyelenggaraan IG .....	27
3.2.3. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya IG Sektorial Yang Terintegrasi.....	28
3.2.4. Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kepuasan Pengguna Terhadap Produk dan Layanan BIG.....	29
3.2.5. Sasaran Strategis 5: Terwujudnya IG Yang Andal Dalam Mendukung Pembangunan Nasional.....	32
3.2.6. Sasaran Strategis 6: Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi .....	35
3.3. Kinerja Anggaran .....	40
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>45</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja BIG Tahun 2018 .....	12
Tabel 2. 2 Alokasi Anggaran BIG per Program.....	13
Tabel 3. 1 Tabel Capaian Kinerja Berdasarkan IKU BIG Tahun 2018 .....	15
Tabel 3. 2 Perubahan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Antara Tahun 2017 dengan Tahun 2018.....	16
Tabel 3. 3 Daftar Provinsi yang Memanfaatkan DG dan IG Kelautan dan Lingkungan Pantai dalam Rangka Penyusunan Raperda RZWP3K Provinsi pada Tahun 2018.....	21
Tabel 3. 4 Komponen Penilaian Tingkat Keandalan IG .....	32
Tabel 3. 5 Rincian Penilaian RB BIG.....	37
Tabel 3. 6 Rincian Penilaian AKIP BIG .....	38
Tabel 3. 7 Realiasi Anggaran Per Unit Kerja Eselon II BIG Tahun 2017 .....	41
Tabel 3. 8 Keterkaitan Sasaran Strategis dengan Realisasi Anggaran BIG Tahun 2018.....	42

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi BIG.....	3
Gambar 1. 2 Komposisi SDM BIG 2018 Berdasarkan Jenis Kelamin .....	4
Gambar 1. 3 Komposisi SDM BIG Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	5
Gambar 1. 4 Komposisi SDM BIG 2018 Berdasarkan Jabatan .....	5
Gambar 1. 5 Komposisi SDM BIG 2018 Berdasarkan Golongan.....	6
Gambar 2. 1 Visi dan Misi Badan Informasi Geospasial .....	10
Gambar 2. 2 Peta Strategi BIG 2015-2019.....	11
Gambar 3. 1 Peta Wilayah Sungai Ciliwung dan Cisadane .....	18
Gambar 3. 2 Hasil Pemodelan Spasial dengan Menggunakan <i>Business As Usual</i> (BAU) dan Skenario Pengembangan Wilayah.....	19
Gambar 3. 3 Contoh Peta Dasar Untuk Penyusunan RDTR Kawasan KEK dan KI.....	20
Gambar 3. 4 Contoh Peta Lahan Baku Sawah.....	22
Gambar 3. 5 Peta Sosial Untuk Mendukung Program Penanggulangan Kemiskinan .....	23
Gambar 3. 6 Pemodelan Spasial Kab. Lombok Utara Tahun 2021, 2026, 2031 dan 2036 ..	24
Gambar 3. 7 Peta Integrasi IGT Cadangan Karbon Provinsi Kalimantan Tengah.....	26
Gambar 3. 8 Capaian Integrasi Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Hingga Tahun 2018 .....	29
Gambar 3. 9 Rataan IKM Berdasarkan Kelompok Pengguna Per Wilayah.....	31
Gambar 3. 10. Nilai IKM per pusat di BIG .....	31
Gambar 3. 11 Grafik Capaian Maturitas BIG Tahun 2014-2018 .....	39
Gambar 3. 12 Pagu Anggaran BIG Tahun 2015-2018.....	40
Gambar 3. 13 Diagram Proporsi Anggaran per Sasaran Strategis .....	44

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2018 BIG melakukan perbaikan terhadap Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 berdasarkan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar lebih fokus pada tugas dan fungsi yang diamanahkan oleh peraturan yang terkait. Hal tersebut berdampak pada penyesuaian sasaran strategis pada *level* pimpinan agar sejalan dengan perubahan Renstra tersebut.

Laporan Kinerja BIG Tahun 2018 ini merupakan gambaran terhadap kinerja dari seluruh unit kerja di BIG yang saling bekerjasama untuk berupaya semaksimal mungkin memenuhi setiap target yang telah ditetapkan. Gambaran tersebut dimulai dari proses perencanaan, perumusan sasaran strategis, penetapan indikator serta target kinerja, hingga evaluasi dan analisis terhadap pelaksanaan kinerja selama tahun 2018.

Penyusunan LAKIN BIG Tahun 2018 adalah pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan disusun menggunakan metodologi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, LAKIN BIG 2018 merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi, sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis, yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja (Renja) 2017.

Secara keseluruhan capaian kinerja BIG tahun 2018 menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik. Dalam penetapan target kinerja tahun 2018 telah ditetapkan sebanyak 6 (enam) sasaran strategis dan 10 (sepuluh) indikator kinerja. Adapun nilai capaian dari masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja adalah sebagai berikut:

**Sasaran Strategis 1:** Meningkatnya kontribusi IG sesuai pembangunan nasional dan masyarakat, memiliki indikator kinerja sebagai berikut:

- Persentase IG yang tersedia sesuai kebutuhan terhadap total kebutuhan IGD terkait pembangunan nasional dan masyarakat. Target yang ditetapkan yaitu sebesar 60% dengan realisasi 60%, maka kinerja yang dihasilkan adalah sebesar 100%.

**Sasaran Strategis 2:** Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan IG, memiliki indikator sebagai berikut:

- Indeks kesadaran K/L/P, Perguruan Tinggi dan Mitra Pembangunan (*awareness index*) terhadap perannya dalam mendukung penyelenggaraan IG. Target yang ditetapkan yaitu indeks 7 dari 10, sementara realisasinya adalah 6.36. Maka kinerja yang dihasilkan adalah 90.86%.

**Sasaran Strategis 3:** Meningkatnya IG sektoral yang terintegrasi, memiliki indikator kinerja sebagai berikut:

- Persentase IG sektoral yang terintegrasi (KSP 1:50.000). Target yang ditetapkan yaitu 100 % dengan realisasi capaian sebesar 100%, maka capaian kinerja yang dihasilkan adalah 100%.



**Sasaran Strategis 4:** Meningkatnya kepuasan pengguna produk dan layanan BIG, memiliki indikator kinerja sebagai berikut:

- Indeks kepuasan pengguna terhadap produk dan layanan IG. Target yang ditetapkan yaitu sebesar 3,8 dari 5 (skala likert), dengan realisasi sebesar 3,85 maka capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 101,31%.

**Sasaran Strategis 5:** Terwujudnya IG yang andal dalam mendukung pembangunan nasional, memiliki 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut:

- Tingkat keandalan IG. Target yang ditetapkan adalah sebesar 8 dari 10 indeks, sementara realisasinya adalah sebesar 8,98. Maka nilai kinerja yang dihasilkan adalah 112,25%; dan
- Persentase peraturan penyelenggaraan IG (Perka) terkait tupoksi BIG yang tersedia terhadap kebutuhan nasional. Target yang ditetapkan pada indikator ini yaitu 80% dengan realisasi yang dihasilkan adalah 100%. Maka nilai capaian kinerja pada indikator ini yaitu 125%.

**Sasaran Strategis 6:** Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, memiliki 4 (empat) indikator kinerja sebagai berikut:

- Nilai reformasi birokrasi BIG. Target yang ditetapkan adalah BIG mendapatkan nilai RB sebesar 71, namun hasil penilaian yang dilakukan oleh Kementerian PANRB bahwa nilai RB BIG untuk tahun 2018 adalah sebesar 67,94. Oleh karena itu capaian kinerja untuk indikator ini adalah 95,69%;
- Opini penilaian laporan keuangan oleh BPK. Target yang ditetapkan tahun 2018 yaitu mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK terhadap laporan keuangan BIG. Realisasi dari indikator kinerja ini adalah BIG mendapat predikat WTP, maka nilai capaian kinerja yang dihasilkan adalah 100%;
- Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja. Target yang ditetapkan yaitu BIG mendapat nilai 68 atas penilaian AKIP yang dilakukan oleh Kementerian PANRB. Namun nilai AKIP yang didapatkan BIG adalah sebesar 63,61, sehingga nilai capaian kinerja yang dihasilkan adalah sebesar 93,54%; dan
- Nilai capaian maturitas SPIP. Target yang ditetapkan adalah sebesar 2,7 dari skala 5, sementara realisasinya adalah 3,37. Oleh karena itu capaian kinerja yang dihasilkan BIG untuk indikator ini adalah sebesar 125%.

Dalam mendukung capaian sasaran strategis tahun 2018, BIG telah merealisasikan anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp. 696.482.054.399,- atau 88.12% dari total pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 796.117.205.000,-. Anggaran tersebut untuk melaksanakan 2 (dua) program yaitu Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Informasi Geospasial. Realisasi anggaran BIG tahun 2018 apabila dibandingkan dengan capaian sasaran strategis menunjukkan adanya efektifitas penggunaan anggaran sebesar XX%.

Berbagai dinamika kebijakan internal dan eksternal yang terjadi sepanjang tahun 2018 baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi capaian kinerja BIG, oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan terkait target IKU untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Badan Informasi Geospasial (BIG) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang dibentuk melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Secara jelas disebutkan dalam UU tersebut bahwa tugas utama BIG adalah penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar (IGD), oleh karena itu melalui Perpres Nomor 127 Tahun 2015 dilakukan reposisi terkait peran koordinator yang membawahi BIG. Diawal pembentukannya BIG berada dibawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi, berdasarkan Perpres tersebut BIG kini berada di bawah koordinasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Peran strategis yang diemban oleh BIG tersebut dimanfaatkan untuk mendukung proses perencanaan pembangunan, karena sejatinya informasi geospasial merupakan hal yang fundamental untuk membuat perencanaan pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang IG, BIG senantiasa dituntut untuk mengedepankan prinsip-prinsip *good governance*, yang artinya dalam segala kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah dari sisi kinerja maupun pengelolaan anggaran. Penyusunan LAKIN BIG 2018 ini merupakan salah satu bentuk perwujudan dari asas akuntabilitas yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun 1999.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban BIG dalam menjalankan tugas dan fungsi selama tahun 2018 dalam rangka menjalankan visi dan misi yang diemban oleh BIG dan menjalankan renstra BIG 2015-2019. Laporan kinerja BIG ini merupakan laporan hasil kinerja yang telah dilaksanakan oleh BIG berdasarkan Perjanjian Kinerja dan target kinerja yang telah ditetapkan/disepakati pada tahun 2018. Laporan kinerja ini juga merupakan salah satu alat kendali dan sebagai *trigger* untuk peningkatan kinerja setiap kinerja unit organisasi di lingkungan BIG dalam menjawab isu-isu strategis yang khususnya berkaitan dengan informasi geospasial.

Sebagaimana diketahui bahwa tahun 2018 merupakan tahun keempat dalam pelaksanaan RPJMN 2015-2019, oleh karena itu BIG sebagai Instansi penyelenggara IGD perlu menampilkan capaian kinerja apa saja yang telah mendukung perencanaan pembangunan sesuai amanat target RPJMN tersebut. Laporan kinerja BIG 2018 inilah sebagai barometer evaluasi kinerja dan pelaksanaan kegiatan, juga menjadi landasan untuk memperbaiki dan meningkatkan pencapaian kinerja tahun berikutnya yaitu tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015-2019.

## 1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja BIG 2018 adalah salah satu bentuk media informasi kepada masyarakat dan pertanggungjawaban kepada Presiden terhadap pelaksanaan program/kegiatan dan penggunaan anggaran BIG. Sementara tujuan penyusunan LAKIN BIG 2018 ini adalah:

- a. Mengetahui prestasi kerja BIG secara keseluruhan yang tercantum dalam sasaran strategis lembaga;
- b. Mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kegagalan capaian kinerja;
- c. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi keberhasilan capaian kinerja;
- d. Menjadi fondasi perbaikan kinerja pada tahun berikutnya dan sebagai bahan evaluasi kinerja; dan
- e. Memenuhi kewajiban dalam asas akuntabilitas sesuai amanat UU.

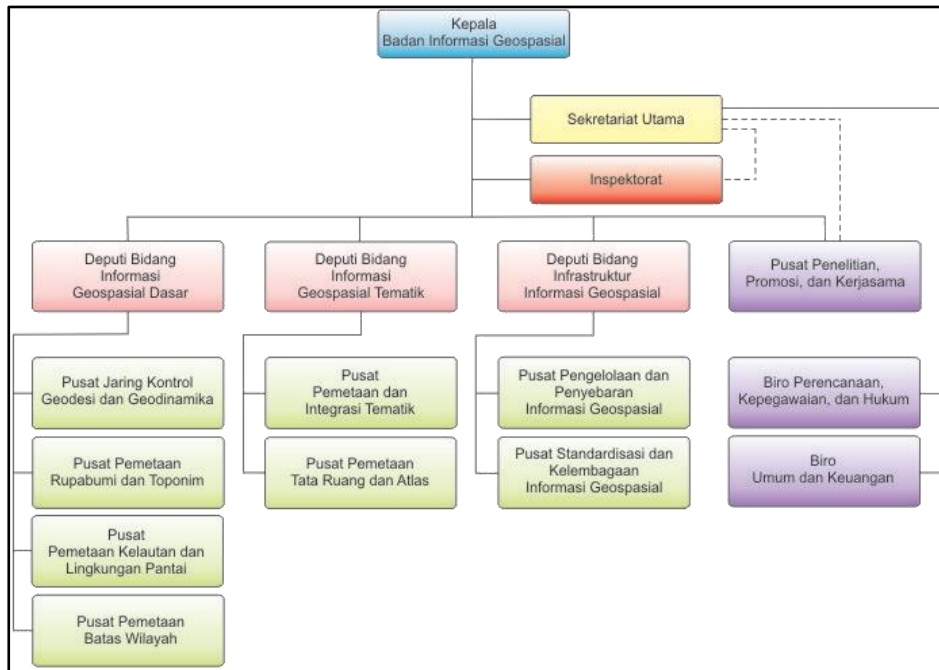
## 1.3. Tugas dan Fungsi BIG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 Tentang Badan Informasi Geospasial, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial ditetapkan bahwa BIG melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial. Dalam melaksanakan tugasnya, BIG menjalankan fungsi:

- a. Perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang informasi geospasial;
- b. Penyusunan rencana dan program di bidang informasi geospasial;
- c. Penyelenggaraan informasi geospasial dasar yang meliputi pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial dasar;
- d. Pengintegrasian informasi geospasial tematik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Penyelenggaraan informasi geospasial tematik yang belum diselenggarakan selain BIG meliputi pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial tematik;
- f. Penyelenggaraan infrastruktur informasi geospasial meliputi penyimpanan, pengamanan, penyebarluasan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial;
- g. Penyelenggaraan dan pembinaan jaringan informasi geospasial;
- h. Akreditasi kepada lembaga sertifikasi dibidang informasi geospasial;
- i. Pelaksanaan kerja sama dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri;
- j. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan BIG;
- k. Pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaporan, penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum; dan
- l. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, keprotokolan, kehumasan, kerja sama,

## 1.4. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan peran strategis dibidang IG, sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 3 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial, struktur organisasi BIG dapat dilihat pada gambar 1.1:



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi BIG

Terdapat 4 unit eselon I yang membantu Kepala BIG dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yang terdiri dari Sekretaris Utama (membawahi 2 unit eselon II), Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar (membawahi 4 unit eselon II), Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik (membawahi 2 unit eselon II), dan Deputi Bidang Infrastruktur Informasi (membawahi 2 unit eselon II), serta satu eselon II yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala BIG yaitu Pusat Penelitian Promosi dan Kerjasama.

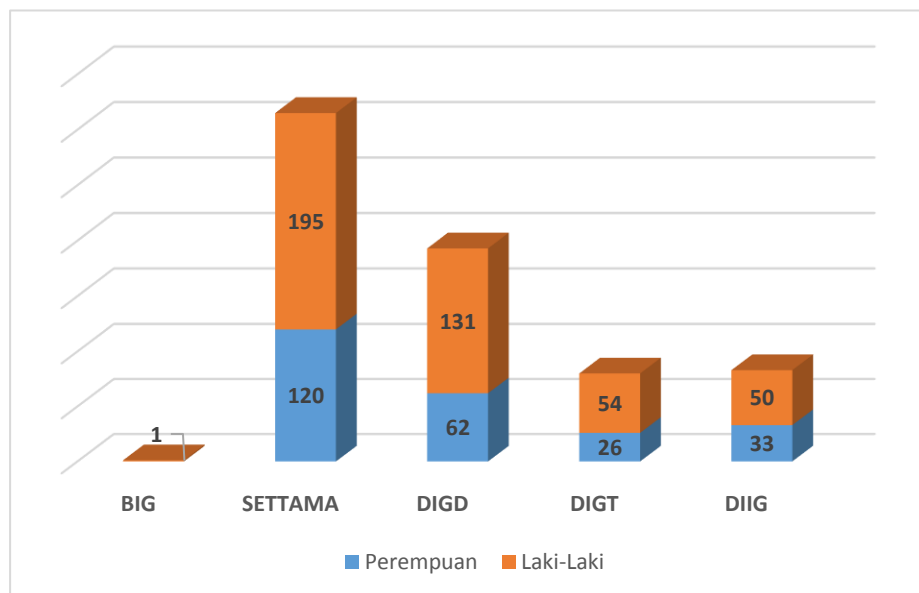
Pada tahun 2015 tepatnya tanggal 1 November 2015, dilakukan reposisi yang sebelumnya BIG dikoordinasikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang riset dan teknologi, saat ini dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BIG dikoordinasikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan nasional, dalam hal ini adalah Bappenas/Menteri PPN. Reposisi ini berdasarkan pada Peraturan Presiden No. 127 Tahun 2015, yang diundangkan pada tanggal 9 November 2015.

## 1.5. Sumber Daya Manusia BIG

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan informasi geospasial yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan maka BIG perlu dukungan dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal. Oleh karena itu BIG secara reguler melakukan peningkatan kompetensi dan kemampuan pegawai baik yang bernaung di unit teknis maupun di kesekretariatan.

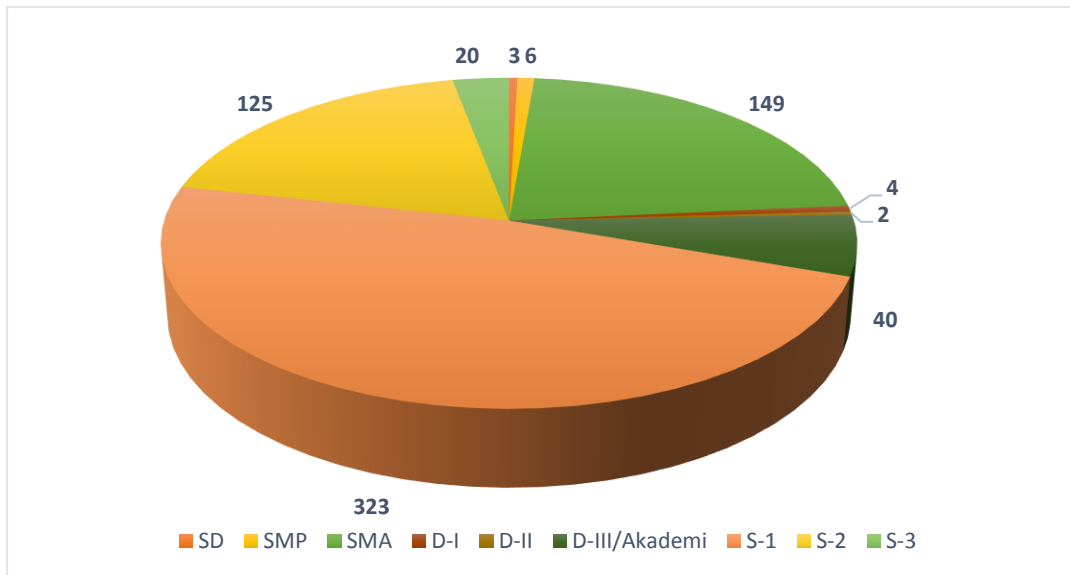
Pada tahun 2018 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan BIG sampai tanggal 31 Desember 2018 berjumlah 672 orang. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebanyak 25 orang (3,72%) dibandingkan tahun 2017 sebanyak 647 orang. Pegawai-pegawai tersebut tersebar di 4 (empat) unit kerja Eselon I, yang terdiri dari berbagai bidang keilmuan seperti: geodesi, geografi, kelautan, ilmu tanah, hukum, administrasi, ilmu komputer, dan lainnya.

Berdasarkan data jenis kelamin didapatkan bahwa komposisi pegawai BIG sebanyak 64,14% adalah laki-laki, hal ini dikarenakan jenis pekerjaan lapangan (survei) yang masih mendominasi proses bisnis utama di BIG. Komposisi SDM BIG tahun 2018 berdasarkan data per unit kerja Eselon I dapat dilihat pada gambar 1.2.



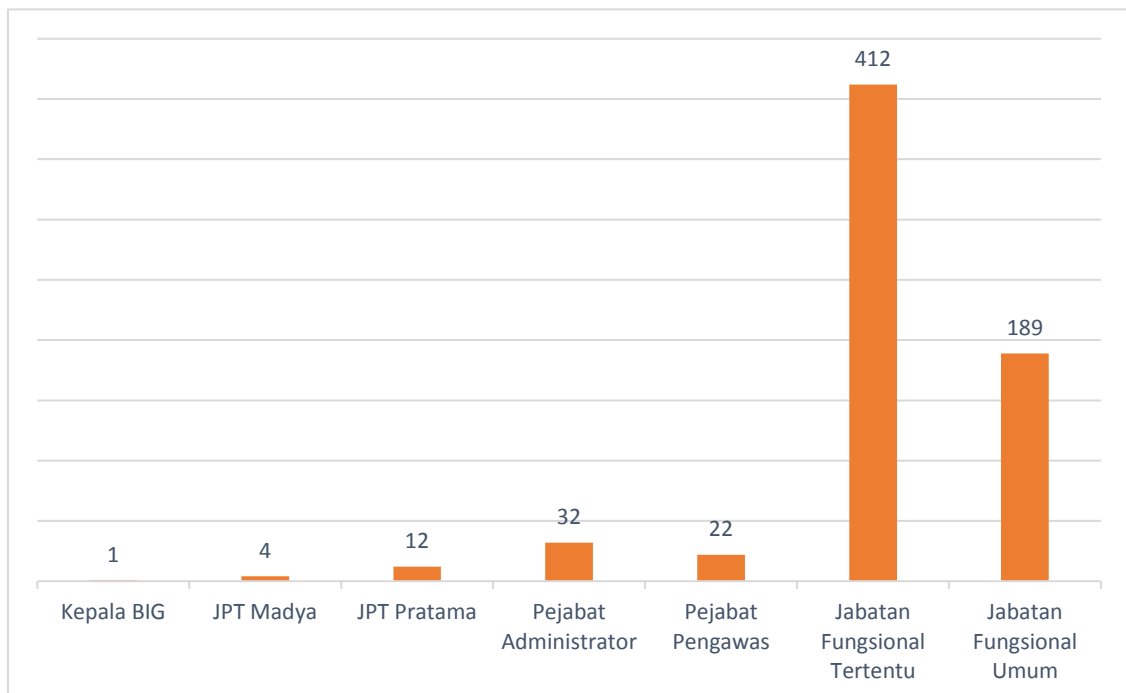
Gambar 1. 2 Komposisi SDM BIG 2018 Berdasarkan Jenis Kelamin

Kualitas pegawai BIG dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan perbaikan, tercermin dari tingkat komposisi pendidikan sebanyak 20 orang (2,98%) berpendidikan Doktor (S3), 125 orang (18,60%) berpendidikan Master (S2), 323 orang (48,07%) berpendidikan Sarjana (S1), 46 orang (6,85%) berpendidikan Diploma (DI-III), 149 orang (22,17%) berpendidikan SMA dan sisanya berpendidikan SMP dan SD sebanyak 6 dan 3 orang (1,34%). Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan selengkapnya dapat dilihat pada gambar 1.3.



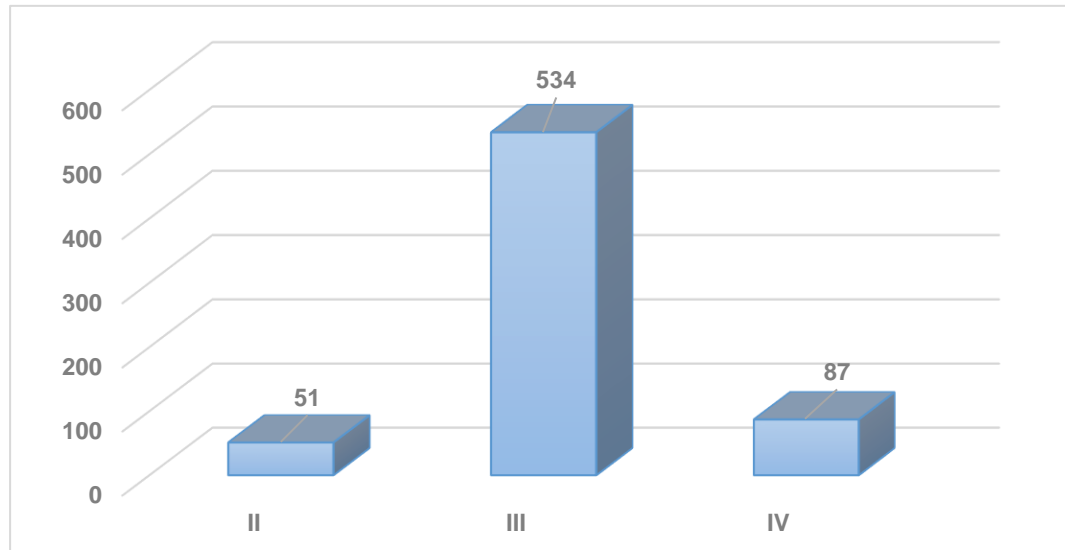
Gambar 1. 3 Komposisi SDM BIG Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sementara jumlah pegawai dilihat berdasarkan tingkat jabatannya terdiri dari 4 orang pejabat pimpinan tinggi madya, 12 orang pejabat tinggi pratama, 32 orang pejabat administrator, 22 orang pejabat pengawas, 412 orang menempati jabatan fungsional tertentu dan 189 orang masih menempati jabatan fungsional umum. Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bahwa setiap pegawai pemerintah dituntut untuk memiliki keahlian khusus yang disebut Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), kedepannya BIG terus mendorong untuk peningkatan kompetensi pegawai yang masih menempati Jabatan Fungsional Umum (JFU) agar dapat menempati salah satu JFT. Berikut disajikan grafik komposisi SDM BIG berdasarkan jabatan yang diemban pada gambar 1.4.



Gambar 1. 4 Komposisi SDM BIG 2018 Berdasarkan Jabatan

Komposisi pegawai BIG berdasarkan jabatan pada gambar 1.4 menunjukkan bahwa sebanyak 263 orang (39,14%) pegawai BIG memiliki jabatan fungsional surveyor pemetaan. Sementara jika dilihat berdasarkan golongan, di BIG masih didominasi oleh PNS golongan III dengan jumlah sebanyak 534 orang. Komposisi SDM berdasarkan golongan kepangkatan di BIG tahun 2018 dapat dilihat pada gambar 1.5.



Gambar 1. 5 Kompisizi SDM BIG 2018 Berdasarkan Golongan

Pengelolaan SDM merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian bagi BIG, mengingat SDM merupakan aset organisasi yang paling berharga faktor penentu keberhasilan pencapaian target kinerja. Siklus manajemen SDM dilakukan reguler setiap tahun mulai dari proses rekrutmen, orientasi, pelatihan dan pengembangan, manajemen kinerja dan pengelolaan tunjangan kinerja serta pelayanan rutin untuk kebutuhan karir pegawai.

Salah satu kekuatan pada aspek sumberdaya manusia yang dimiliki BIG adalah perencanaan SDM, dimana BIG telah melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan kebutuhan pegawai yang dilakukan didahului dengan melakukan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan hingga rencana distribusi pegawai ke masing-masing unit kerja. Bahkan untuk evaluasi jabatan telah dilakukan pada seluruh unit kerja yang ada di BIG. Proses penerimaan pegawai baik PNS maupun tenaga kontrak juga telah dilakukan secara transparan, objektif, akuntabel serta bebas praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Selain itu, secara kualitas BIG telah memiliki SDM yang kompeten di bidang informasi geospasial. Beberapa tenaga ahli BIG di bidang informasi geospasial bahkan telah mendapat pengakuan baik pada skala nasional maupun internasional.

Promosi jabatan tinggi secara terbuka telah dilakukan dengan optimal di lingkungan BIG sejak tahun 2015, dengan menyusun kebijakan yang mengatur pelaksanaan promosi jabatan tinggi tersebut. Pada tahun 2018 telah dilakukan seleksi terbuka untuk menempati posisi jabatan pimpinan tinggi madya yaitu Sekretaris Utama dan jabatan pimpinan tinggi pratama yaitu Kepala Biro Perencanaan, Kepegawaian dan Hukum. Akhir tahun 2018, tepatnya pada tanggal 01 Oktober 2018 telah dilakukan pelantikan jabatan pimpinan tinggi hasil lelang tersebut.

## 1.6. Potensi, Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Penyelenggaraan IG

Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang perubahan garis koordinasi BIG dari Kementerian Riset dan Teknologi menjadi dibawah koordinasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, merupakan salah satu bukti bahwa penggunaan informasi geospasial adalah hal mendasar sebelum melakukan perencanaan pembangunan. Peran BIG menjadi lebih terlihat semenjak berada dibawah koordinasi Bappenas dalam rangka mengoptimalkan penyediaan dan pemanfaatan informasi geospasial dalam mendukung perencanaan pembangunan nasional. Proses perencanaan pembangunan tidak lepas dari kebutuhan terhadap peta dasar secara khusus dan informasi geospasial secara umum untuk menentukan lokasi yang menjadi fokus percepatan pembangunan.

Badan Informasi Geospasial mendapat tugas khusus dari Presiden melalui Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Kebijakan Satu Peta. Kebijakan tersebut menuntut BIG sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan menyelenggarakan IGD untuk menyediakan data dasar untuk keperluan pemetaan tematik di Indonesia. Kebijakan Satu Peta hadir sebagai jawaban atas tumpang tindihnya berbagai kebijakan sektoral dan ketidaksesuaian perencanaan tata ruang yang selama ini terjadi. Oleh karena itu potensi ini yang menjadi acuan bagi BIG untuk melakukan percepatan penyediaan data dasar seluruh Indonesia dalam jangka waktu 2020-2024.

Adapun yang menjadi isu-isu strategis yang berhasil dihimpun sepanjang tahun 2018 ini adalah:

1. Koordinasi penyelenggaraan IG

Dapat dikatakan bahwa pengelolaan data dan informasi geospasial masih dianggap tidak efektif dan efisien oleh beberapa *stakeholders*, sehingga beberapa kebijakan tumpang tindih;

2. Produksi Data dan IG

Data dan informasi geospasial yang dihasilkan masih ada yang belum mengacu pada satu standar nasional, serta masih banyak data yang *obsolete* dan belum divalidasi;

3. Jaringan Distribusi Data dan IG

Simpul jaringan yang dibina oleh BIG belum mampu melakukan pertukaran data yang signifikan antar simpul jaringan yang telah terkoneksi. Dilain pihak terdapat simpul jaringan yang belum terkoneksi dengan baik.

4. Pemanfaatan Data dan IG

Kementerian/Lembaga dan Daerah yang menghasilkan atau menyelenggarakan IGT masih dimanfaatkan secara parsial/sektoral oleh instansi pembuatnya. Oleh karena itu peran koordinasi yang melekat di BIG harus dijalankan secara maksimal; dan

5. SDM, Kelembagaan, IPTEK dan Industri IG

Isu SDM menjadi hal yang krusial yang dihadapi BIG, dari sisi penyedia dapat dilihat bahwa tenaga surveyor yang memiliki kompetensi ahli pengolahan data geospasial masih sangat terbatas. Sementara di sisi pengguna, selain kurangnya tenaga ahli di bidang data dan informasi geospasial, pengetahuan tentang bagaimana menggunakan dan pentingnya data dan informasi geospasial dalam sebuah proses perencanaan dan penyusunan kebijakan juga masih terbatas;



Terkait kelembagaan di daerah yang mempunyai tugas dan fungsi khususnya di bidang Informasi Geospasial masih belum jelas. Penguatan simpul jaringan yang tidak hanya sebagai unit kliring, namun juga sebagai pengelola data dan informasi geospasial di daerah perlu terus diperkuat perannya;

Selanjutnya isu mengenai IPTEK bahwa penguasaan teknologi di bidang data dan informasi geospasial nasional masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara maju, sehingga sangat berpengaruh terhadap kecepatan pengadaan dan pemanfaatan data dan informasi geospasial;

Terakhir permasalahan industri Informasi Geospasial bahwa jumlah penyedia barang dan jasa di bidang Informasi Geospasial tidak sebanding dengan tuntutan penyediaan Informasi Geospasial yang diamanatkan di dalam UU Informasi Geospasial. Selain itu, jenis usaha dari penyedia jasa juga masih terbatas. Hal ini akan mengakibatkan peluang masuknya penyedia barang dan jasa dari mancanegara. Peningkatan kapasitas industri tersebut harus didukung dengan ketersediaan SDM di bidang Informasi Geospasial yang kompeten dan terakreditasi.

Sehubungan dengan hal yang disebutkan di atas maka BIG perlu melakukan antisipasi terkait potensi, isu dan permasalahan tersebut. Peran strategis dalam penyelenggaraan informasi geospasial khususnya penyediaan data dasar harus dimaksimalkan dan secara paralel melaksanakan penguatan koordinasi, peningkatan kompetensi SDM, perbaikan kerangka regulasi, dan dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang efektif.

## 1.7. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Penyusunan LAKIN BIG 2018 berlandaskan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka dari itu LAKIN BIG 2018 menggunakan sistematika sebagai berikut:

- a. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini dijelaskan secara ringkas latar belakang penyusunan LAKIN BIG 2018, penjabaran tugas dan fungsi BIG, struktur organisasi, serta sistematika penyajian;
- b. **Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini dijelaskan tentang rencana strategis BIG 2015-2019 hingga proses *cascading* hingga menjadi Perjanjian Kinerja BIG Tahun 2018. Mulai dari kegiatan perencanaan, monitoring, pelaporan dan evaluasi;
- c. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, pada bab ini dijelaskan mengenai pencapaian setiap sasaran strategis pada setiap perspektif yang tertuang dalam peta strategi dan akuntabilitas penggunaan anggaran BIG tahun 2018; dan
- d. **Bab IV Penutup**, pada bab ini dijelaskan kesimpulan atas laporan kinerja BIG tahun 2018 beserta rekomendasi untuk perbaikan kinerja pada tahun selanjutnya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini menjelaskan mengenai alur perencanaan kinerja yang BIG laksanakan pada tahun 2018. Dalam melaksanakan program dan kegiatannya BIG mengacu pada beberapa dokumen yang menjadi dasar perumusan perencanaan kinerja. Dokumen tersebut adalah rencana strategis BIG tahun 2015-2019 yang diturunkan menjadi dokumen perjanjian kinerja tahun 2018. Dalam dokumen perjanjian kinerja tersebut ditentukan sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang menjadi tolak ukur pelaksanaan kinerja dan akan dipertanggungjawabkan pada akhir tahun anggaran.

#### **2.1. Rencana Strategis BIG 2015-2019**

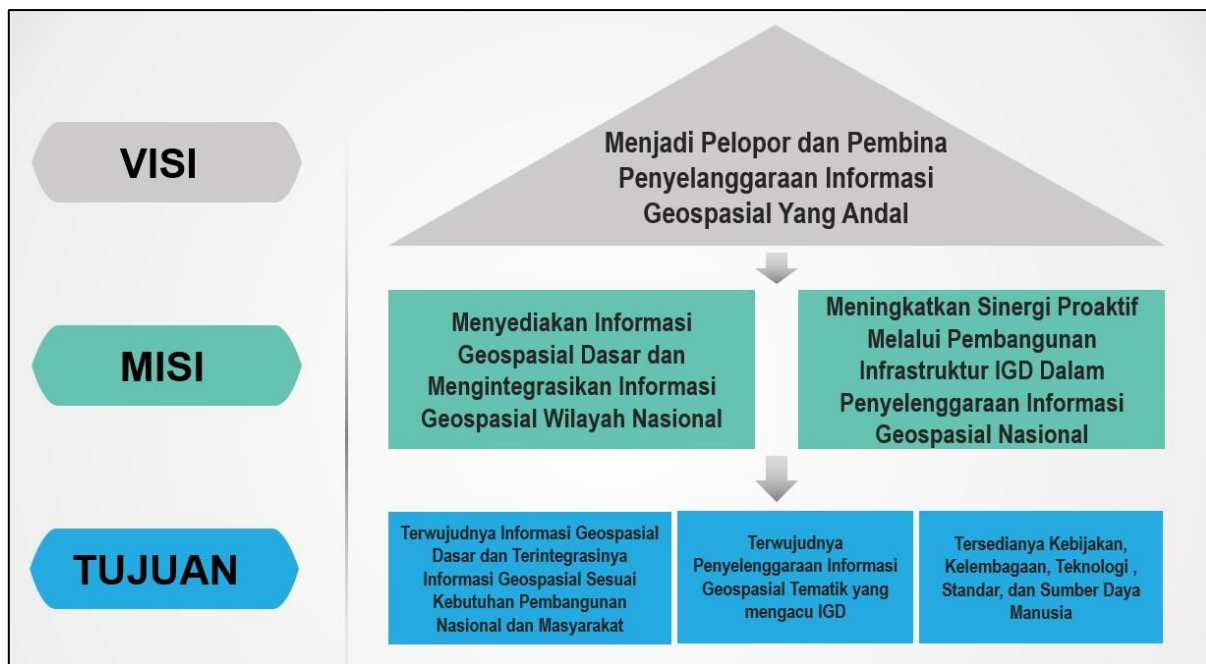
Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan kinerja BIG mengacu pada dokumen Renstra BIG 2015-2019. Rencana Strategis BIG disusun dengan menyelaraskan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, artinya secara umum bahwa seluruh K/L di Indonesia dalam membuat perencanaan harus mengacu pada dokumen perencanaan tingkat pusat. Dinamika yang terjadi pada lingkungan internal BIG maupun kondisi eksternal membuat dan memaksa BIG melakukan revitalisasi pada perencanaan strategis yang dalam hal ini tercantum dalam dokumen Renstra. Terhitung sepanjang tahun 2015-2018 telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali penyesuaian terhadap Renstra BIG 2015-2019.

Penyesuaian pertama Renstra BIG 2015-2019 dilakukan dalam rangka mengakomodir keluarnya Perpres Nomor 127 Tahun 2015 tentang perpindahan status koordinasi BIG dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menjadi Kementerian PPN/Bappenas. Reposisi ini mengakibatkan peran dan tanggung jawab BIG semakin besar, sekaligus strategis karena secara langsung mendukung kegiatan perencanaan pembangunan nasional. Melalui Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 28.1 Tahun 2016 telah ditetapkan Revitalisasi Rencana Strategis Badan Informasi Geospasial Tahun 2015-2019, yang ditetapkan pada tanggal 2 September 2016 oleh Kepala BIG.

Pada pertengahan tahun 2017, hasil rapat pimpinan bahwa Renstra BIG 2015-2019 perlu dilakukan revisi kembali, mengingat adanya tuntutan dari Presiden terkait program Prioritas Nasional (PN) yang setiap tahunnya berubah mengikuti skema *money follows program*. Oleh karena itu dilakukanlah penyesuaian kedua dan dokumen tersebut diberi nama Revisi Revitalisasi Renstra BIG 2015-2019.

Berdasarkan arahan dari Kementerian PANRB dan semakin strategisnya peran BIG dalam mendukung perencanaan pembangunan nasional sehingga permintaan akan data dasar (IGD) terus mengalami peningkatan, maka dilakukan penyesuaian ketiga terhadap Renstra BIG 2015-2019. Dokumen tersebut disahkan melalui Keputusan Kepala BIG Nomor 64 Tahun 2018 pada tanggal 23 Oktober Tahun 2018. Perubahan mendasar dari penyesuaian ketiga ini adalah penguatan visi dan misi yang akan dicapai oleh BIG mengikuti peran strategis yang diemban.

Oleh karena itu sesuai dengan Renstra BIG 2015-2019 yang terakhir, maka ditentukanlah visi, misi dan tujuan yang akan dicapai BIG pada gambar 2.1.



Gambar 2. 1 Visi dan Misi Badan Informasi Geospasial

Visi BIG mengandung 4 (empat) kata kunci, yaitu “pelopor”, “pembina”, “penyelenggara” dan “andal”. Pelopor mengandung makna bahwa BIG sebagai pencetus ide, menjadi lembaga yang berada di depan, merumuskan arah dan tujuan untuk penyediaan informasi geospasial sekaligus selaku penyelenggara IGD sebagai acuan IGT nasional. Pembina mengandung makna bahwa BIG memberikan pembekalan/pembinaan yang dibutuhkan oleh penyelenggaran IG lainnya berupa kebijakan, standar yang diperlukan serta pembinaan dalam pelaksanaan sertifikasi SDM. Penyelenggara memiliki makna sesuai yang tertera pada UU Nomor 4 Tahun 2011 pasal 25, yaitu penyelenggaraan IG terdiri dari pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan dan pengamanan, penyebarluasan dan penggunaan IG. Terakhir adalah andal memiliki makna bahwa IG yang dihasilkan memiliki kriteria lengkap, akurat, berstandar, aktual dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam rangka mengimplementasikan dua misi BIG yang tertera pada gambar 2.1, BIG perlu menyusun tujuan organisasi yang merupakan bentuk lebih sempit dari visi. Tujuan organisasi adalah untuk memperjelas visi dan misi organisasi yang sudah ditentukan serta untuk menggambarkan arah strategik organisasi. Oleh karena itu BIG menetapkan tujuan organisasi adalah sebagai berikut:

- Terwujudnya informasi geospasial dasar dan terintegrasinya informasi geospasial sesuai kebutuhan pembangunan nasional dan masyarakat;
- Terwujudnya penyelenggaraan informasi geospasial tematik yang mengacu IGD; dan
- Tersedianya kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan sumber daya manusia.

Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata perlu disusun sasaran strategis yang merupakan gambaran kondisi yang harus terpenuhi dalam rangka mewujudkan strategi organisasi. Dalam penyusunan sasaran strategis, BIG menggunakan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi kedalam empat perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*, yang dapat dilihat pada gambar 2.2.



Gambar 2. 2 Peta Strategi BIG 2015-2019

Berikut ini dijabarkan penjelasan dari masing-masing perspektif pada peta strategi tersebut:

a. *Stakeholders Perspective*

Terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis, (SS1) yaitu **meningkatnya kontribusi IG sesuai kebutuhan pembangunan Nasional dan Masyarakat**, dengan indikator kinerja: Rasio IG yang tersedia sesuai kebutuhan terhadap total kebutuhan IGD terkait pembangunan nasional dan masyarakat;

b. *Customer Perspective*

Terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis, (SS2) yaitu **meningkatnya peran serta masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan IG**, dengan indikator kinerja: Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan IG;

Sasaran strategis (SS3), yaitu **berkurangnya IG yang tumpang tindih dengan K/L lain**, dengan indikator kinerja: Rasio IG yang tumpang tindih;

Sasaran strategis (SS4), yaitu **Meningkatnya kepuasan pengguna produk dan layanan BIG**, dengan indikator kinerja: Indeks kepuasan pengguna terhadap produk dan layanan BIG;

c. *Internal Process Perspective*

Terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis, (SS5) yaitu **terwujudnya IG yang akurat, mudah diakses, dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung pembangunan nasional**, dengan 2 (dua) indikator kinerja:

- 1) Indeks akurasi IG; dan
- 2) Rasio peraturan penyelenggaraan IG yang tersedia dan terimplementasikan.

d. *Learning and Growth Perspective*

Perspektif terakhir terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis, (SS6) yaitu **terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi**, dengan 3 (tiga) indikator kinerja:

- 1) Indeks reformasi birokrasi BIG;
- 2) Opini penilaian laporan keuangan oleh BPK; dan
- 3) Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja.

## 2.2. Penetapan Kinerja BIG Tahun 2018

Penetapan kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Penetapan kinerja secara teknis pelaksanaan adalah penandatanganan perjanjian kinerja yang dalam hal ini adalah butir-butir kesepakatan antara atasan langsung dengan bawahan langsung tentang apa yang ingin dicapai beserta penentuan target kinerja untuk 1 (satu) tahun kedepan. Secara lebih khusus perjanjian kinerja adalah tekad dan janji yang akan dicapai oleh pimpinan pada unit kerja di BIG yang menerima amanah serta tanggung jawab untuk mencapai target kinerja pada tahun 2018. Perjanjian kinerja BIG tahun 2018 masih berdasarkan pada sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang tercatum pada Dokumen Revitalisasi Renstra BIG 2015-2019, karena penyesuaian ketiga Renstra BIG 2015-2019 dilakukan pada triwulan IV tahun 2018 sehingga tidak dilakukan perubahan terhadap dokumen perjanjian kerjanya.

Perjanjian kinerja BIG disusun dengan tujuan sebagai: (a) wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur; (b) tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; (c) dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta pemberian penghargaan dan sanksi; (d) dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan kinerja penerima amanah; (e) dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Dokumen tersebut berisi indikator kinerja utama beserta targetnya, dimana indikator kinerja tersebut memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan, yaitu spesifik (*specific*), dapat diukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), keterkaitan (*relevant*), berjangka waktu tertentu (*time bound*), dan dapat dipantau pelaksanaannya.

Tahun 2018 BIG menetapkan perjanjian kinerja sebagai wujud komitmen untuk mencapai visi dalam mendukung program prioritas pembangunan nasional serta komitmen dalam mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah. Perjanjian Kinerja BIG tahun 2018 secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja BIG Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET TAHUN 2018
1	Meningkatnya kontribusi IG sesuai kebutuhan pembangunan Nasional dan Masyarakat	1	Persentase IG yang tersedia sesuai kebutuhan terhadap total kebutuhan IGD terkait pembangunan nasional dan masyarakat	60%
2	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan IG	2	Indeks kesadaran K/L/P, PT dan Mitra Pembangunan ( <i>awareness index</i> ) terhadap perannya dalam mendukung penyelenggaraan IG	7 (Indeks 1-10)
3	Meningkatnya IG sektoral yang terintegrasi	3	Persentase IG sektoral yang terintegrasi (KSP 1:50.000)	100%
4	Meningkatnya kepuasan pengguna produk dan layanan BIG	4	Indeks kepuasan pengguna terhadap produk dan layanan BIG	3.8 Skala Likert (1-5)

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET TAHUN 2018
5	Terwujudnya IG yang andal dalam mendukung pembangunan nasional	5	Tingkat keandalan IG	8 (Indeks 1-10)
		6	Persentase peraturan penyelenggaraan IG (Perka) terkait tupoksi BIG yang tersedia terhadap kebutuhan nasional	80%
6	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi	7	Nilai Reformasi Birokrasi BIG	71 (Nilai RB)
		8	Opini penilaian laporan keuangan oleh BPK	WTP
		9	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	68 (Nilai AKIP)
		10	Nilai Capaian Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) BIG	2,7 (Dari Skala 5)

Perjanjian kinerja tersebut diimplementasikan kedalam 2 (dua) program utama BIG, yaitu program penyelenggaraan informasi geospasial dan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Selanjutnya program tersebut akan diterjemahkan lebih detail menjadi kegiatan yang dikerjakan pada tahun 2018

### 2.3. Alokasi Anggaran

Untuk mewujudkan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja, BIG mendapat dukungan anggaran dari APBN sebesar Rp. 796.117.205.000,- untuk melaksanakan 2 (dua) program utama BIG. Adapun program tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Alokasi Anggaran BIG per Program

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Informasi Geospasial	Rp. 167.077.164.000,-
2	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	Rp. 617.299.911.000,-

Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 12 (dua belas) kegiatan yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan kesekretariatan dan 8 (delapan) kegiatan teknis yang bersifat strategis dan mendukung terlaksananya perencanaan pembangunan yang dicanangkan pemerintah melalui program prioritas nasional.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini menjelaskan mengenai akuntabilitas kinerja BIG berdasarkan hasil pengukuran capaian serta evaluasi standar kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2018. Pengukuran capaian kinerja BIG tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja yang tertuang pada dokumen perjanjian kinerja Kepala BIG. Secara umum capaian kinerja BIG adalah sebesar 102,39%, Nilai tersebut mengalami penurunan dibanding capaian tahun 2017 yaitu sebesar 141,33%

#### **3.1. Analisis Capaian Kinerja Organisasi**

Dalam rangka mengetahui keberhasilan dan ketidaksesuaian pencapaian target kegiatan maka perlu dilakukan analisis capaian kinerja organisasi. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat dengan cara membandingkan antara kinerja yang dihasilkan dengan target indikator kinerja yang ditetapkan. Capaian kinerja BIG merupakan kinerja secara utuh sebagai satu kesatuan dari 4 (empat) unit kerja Eselon I di BIG, berdasarkan atas perjanjian kinerja yang telah ditandatangani dan disepakati oleh seluruh pimpinan yang kemudian diturunkan (*cascading*) hingga level bawahnya secara berjenjang. Perjanjian kinerja BIG terdiri dari peta strategi yang menggambarkan hubungan sebab akibat dari masing-masing Sasaran Strategis (SS) BIG, ukuran pencapaian sasaran strategis berupa IKU dan target. Setiap akhir tahun anggaran, BIG melakukan evaluasi terhadap perjanjian kinerja yang direncanakan dan mulai melakukan penyusunan untuk perjanjian kinerja tahun berikutnya.

Evaluasi yang dilakukan adalah dengan membandingkan target dan realisasi pada periode tahun penyusunan LAKIN. Sementara penyesuaian target untuk tahun berikutnya dilakukan dengan menggunakan analisis tren (*trend analysis*) capaian kinerja beberapa tahun terakhir. Proses pengukuran capaian kinerja BIG masih dilakukan secara manual artinya belum menggunakan aplikasi dikarenakan masih adanya beberapa kendala dari sisi budaya kerja yang masih perlu dilakukan pembenahan.

Sebagai wujud akuntabilitas kinerja BIG, penilaian capaian indikator kinerja utama merupakan manifestasi terhadap capaian *outcome* dan *output* yang dihasilkan oleh BIG. Terdapat 10 (sepuluh) indikator kinerja utama dari 6 sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja BIG tahun 2018. Semua indikator tersebut dapat dikatakan berhasil dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Lebih jelas mengenai capaian kinerja BIG tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3. 1 Tabel Capaian Kinerja Berdasarkan IKU BIG Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018		
				TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya kontribusi IG sesuai kebutuhan pembangunan Nasional dan Masyarakat	1	Persentase IG yang tersedia sesuai kebutuhan terhadap total kebutuhan IGD terkait pembangunan nasional dan masyarakat	60%	60%	100
2	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan IG	2	Indeks kesadaran K/L/P, PT dan Mitra Pembangunan ( <i>awareness index</i> ) terhadap perannya dalam mendukung penyelenggaraan IG	7 (Indeks 1-10)	6,36	90,86
3	Meningkatnya IG sektoral yang terintegrasi	3	Persentase IG sektoral yang terintegrasi (KSP 1:50.000)	100%	100%	100
4	Meningkatnya kepuasan pengguna produk dan layanan BIG	4	Indeks kepuasan pengguna terhadap produk dan layanan BIG	3,8 (Skala Likert 1-5)	3,85	101,31
5	Terwujudnya IG yang andal dalam mendukung pembangunan nasional	5	Tingkat keandalan IG	8 (Indeks 1-10)	8,98	112,25
		6	Persentase peraturan penyelenggaraan IG (Perka) terkait tupoksi BIG yang tersedia terhadap kebutuhan nasional	80%	100%	125
6	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi	7	Nilai Reformasi Birokrasi BIG	71 (Nilai RB)	67,94	95,69
		8	Opini penilaian laporan keuangan oleh BPK	WTP	WTP	100
		9	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	68 (Nilai AKIP)	63,61	93,54
		10	Nilai Capaian Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) BIG	2,7 (Dari Skala 5)	3,37	125

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab II bahwa pada tahun 2018 dilakukan penyesuaian terhadap Renstra BIG yang juga berdampak pada penyesuaian sasaran strategis serta indikator kinerja tahun untuk tahun berikutnya. Namun penyesuaian dokumen Renstra BIG 2015-2019 tersebut tidak diikuti dengan perubahan dokumen perjanjian kinerja tahun 2018. Karena proses penyesuaian renstra dilakukan diakhir tahun anggaran sehingga dapat mengganggu capaian kinerja yang telah dihasilkan apabila dokumen perjanjian kinerja diubah.

Terkait nomenklatur sasaran strategis dan indikator kinerja yang mengalami perubahan antara tahun 2017 dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.2.



Tabel 3. 2 Perubahan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja  
Antara Tahun 2017 dengan Tahun 2018

2017		2018		KET
SS	IKU	SS	IKU	
Meningkatnya kontribusi BIG dalam menyukseskan RPJMN (Nawa Cita	Rasio IG yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan agenda prioritas nasional dibanding jumlah IG yang dihasilkan untuk mendukung prioritas nasional	Meningkatnya kontribusi IG sesuai kebutuhan pembangunan Nasional dan Masyarakat	Persentase IG yang tersedia sesuai kebutuhan terhadap total kebutuhan IGD terkait pembangunan nasional dan masyarakat	<b>Penyesuaian nomenklatur SS dan IKU</b>
Tersedianya IG sesuai dengan roadmap KSP	Rasio IGT yang terintegrasi terhadap total IGT yang datanya tersedia pada wali data	Meningkatnya IG sektoral yang terintegrasi	Persentase IG sektoral yang terintegrasi (KSP 1:50.000)	<b>Perubahan SS dan IKU</b>
Terwujudnya IG yang akurat, mudah diakses, dapat dipertanggung-jawabkan dalam mendukung pembangunan nasional	Indeks akurasi IG	Terwujudnya IG yang andal dalam mendukung pembangunan nasional	Tingkat keandalan IG	<b>Penyesuaian nomenklatur SS dan IKU</b>
			Persentase peraturan penyelenggaraan IG (Perka) terkait tupoksi BIG yang tersedia terhadap kebutuhan nasional	<b>Penambahan IKU baru</b>
Meningkatnya capaian Reformasi Birokrasi Badan Informasi Geospasial (BIG) berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sesuai roadmap Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) 2015 – 2019	Nilai Reformasi Birokrasi BIG Rasio program perubahan yang telah memanfaatkan TIK terhadap total program perubahan pada roadmap RB BIG	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi	Nilai Reformasi Birokrasi BIG	<b>Perubahan SS</b>
			Opini penilaian laporan keuangan oleh BPK	<b>Pergantian IKU dengan penambahan 3 (tiga) IKU baru</b>
			Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Capaian Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) BIG	

Perubahan beberapa sasaran strategis dan IKU yang tertuang pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2018 adalah dalam rangka menyesuaikan dengan peran BIG yang semakin strategis dalam penyelenggaraan informasi geospasial untuk mendukung perencanaan pembangunan.

### **3.2. Analisis Capaian Setiap Sasaran Strategis**

Pada subbab ini akan dijelaskan mengenai analisis capaian kinerja terkait hasil perhitungan nilai yang didapat sehingga terlihat target kinerja tersebut tercapai atau tidak. Analisis capaian kinerja ini menjabarkan setiap penjelasan dari SS dan IKU yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2018.

#### **3.2.1. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kontribusi IG Sesuai Kebutuhan Pembangunan Nasional dan Masyarakat**

Sasaran strategis meningkatnya kontribusi IG sesuai kebutuhan pembangunan pembangunan nasional dan masyarakat merupakan amanah yang harus dipenuhi BIG sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan informasi geospasial khususnya penyediaan data dasar. Sejak perpindahan koordinasi dibawah Kementerian PPN/Bappenas, peran BIG memang lebih strategis untuk mengawal dan memberikan dukungan data informasi geospasial dalam proses perencanaan pembangunan. Sejak pendekatan THIS (tematik, holistik, integratif dan spasial) yang diluncurkan oleh Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2016 membuat BIG memiliki tanggung jawab yang semakin besar karena unsur spasial harus masuk dalam setiap proses perencanaan pembangunan.

Unsur spasial dalam pendekatan THIS mengisyaratkan bahwa perencanaan pembangunan nasional harus didasarkan pada data dan informasi geospasial yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap sasaran strategis memerlukan indikator kinerja untuk mengukur ketercapainnya, adapun indikator kinerja yang ditentukan adalah “Persentase IG yang Tersedia Sesuai Kebutuhan Terhadap Total Kebutuhan IGD Terkait Pembangunan Nasional dan Masyarakat”.

Cara pengukuran indikator kinerja tersebut adalah dengan membandingkan antara ketersediaan IG pada tahun 2018 dengan kebutuhan IGD pada tahun yang sama. Target yang ditentukan pada indikator ini adalah sebesar 60%, dengan asumsi bahwa ketersediaan IG yang dihasilkan sesuai kebutuhan mencapai lebih dari 60%. Presentase IG yang dihitung dalam pengukuran capaian indikator ini melibatkan antara IGD, IGT, dan IIG yang tersedia.

Kontribusi IG sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan masyarakat ditandai dengan keterlibatan BIG dalam pemenuhan agenda Prioritas Nasional (PN) yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Pada tahun 2018 BIG berkontribusi dalam keberhasilan 6 (enam) PN, yaitu (i) Perumahan dan Permukiman; (ii) Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata; (iii) Ketahanan Pangan; (iv) Penanggulangan Kemiskinan; (v) Insfratraktur, Konektivitas, dan Kemaritiman; dan (vi) pembangunan wilayah. Terkait penjelasan lebih detil mengenai kontribusi BIG terhadap 6 (enam) PN tersebut adalah sebagai berikut.

## (i) Perumahan dan Permukiman

Pada Prioritas Nasional pertama ini BIG berkontribusi menyediakan IG dalam melakukan kegiatan prioritas nasional yaitu Peningkatan Ketersediaan Air Baku yang berkaitan dengan tema PN yaitu Perumahan dan Permukiman. Dalam pelaksanaannya BIG membuat Peta Integrasi Neraca Spasial 4 (empat) Komponen Sumber Daya Alam untuk melakukan Evaluasi Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan peta integrasi neraca ini mencakup Wilayah Sungai (WS) Ciliwung Cisadane yang terbentang meliputi tiga provinsi yaitu Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Barat.

Sasaran dari adanya kegiatan ini adalah tersedianya informasi geospasial tematik neraca sumberdaya alam lahan, hutan, air, mineral dan batubara, serta analisis integrasi neraca dari empat komponen sumberdaya, laju konversi lahan, evaluasi tata ruang berdasarkan indeks sumberdaya alam dalam rangka peningkatan ketersediaan air baku. Output dari kegiatan ini berupa IG integrasi berupa buku pola pengelolaan sumberdaya WS dari 4 (empat) komponen Neraca Spasial SDA yaitu hutan, lahan, air, dan minerba. Dari hasil yang telah dilakukan pada kegiatan ini masih ditemukan banyak ketidaksesuaian pembangunan rencana tata ruang sebesar 12,52% yang berada di WS Ciliwung Cisadane.

Harapannya dokumen ini dapat menjadi bahan acuan dalam pelaksanaan pembangunan tata ruang dan lingkungan hidup yang lebih baik dengan mempertimbangkan neraca spasial 4 (empat) komponen SDA. Hasil dari kegiatan ini dapat dilihat pada gambar 3.1.



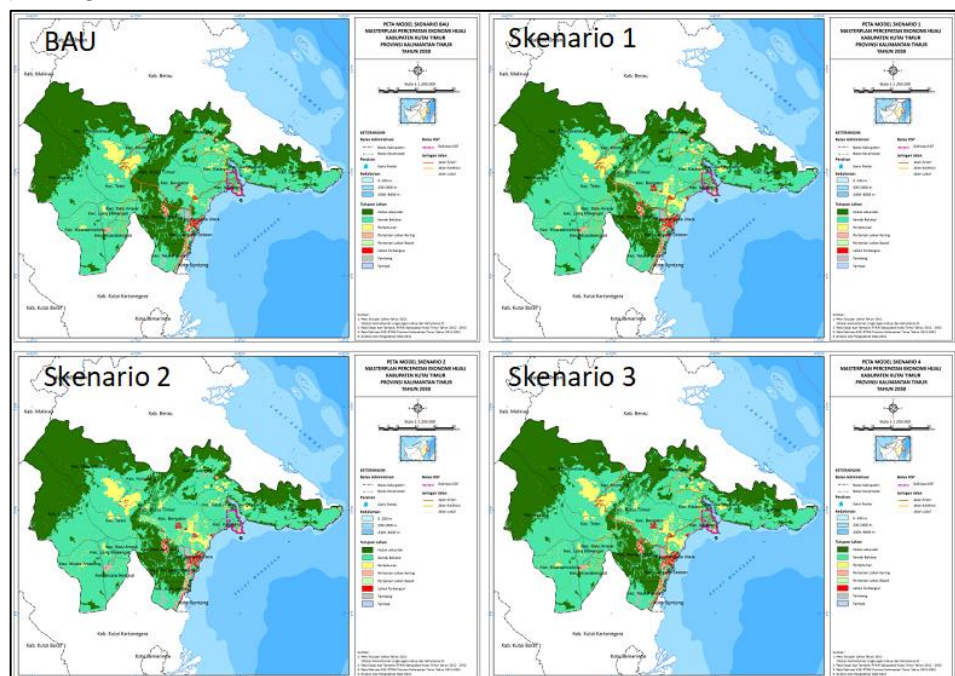
Gambar 3. 1 Peta Wilayah Sungai Ciliwung dan Cisadane

## (ii) Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata

Badan Informasi Geospasial (BIG) ikut berkontribusi melakukan kegiatan yang mendukung program PN pengembangan dunia usaha dan pariwisata melalui 9 (sembilan) kegiatan prioritas yang terkait, yaitu (1) Pengembangan KSPN Mandalika; (2) Percepatan Pembangunan KEK Sorong; (3) Percepatan Pembangunan KEK Tanjung Kelayang; (4) Percepatan Pembangunan KEK Bitung; (5) Percepatan Pembangunan KEK Maloy-Batuta Trans Kalimantan (MBTK); (6) Percepatan Pembangunan KEK Morotai; (7) Percepatan Pembangunan KEK Morowali; (8) Percepatan Pembangunan KEK Bantaeng; dan (9) Dukungan Pengembangan KL Lainnya.

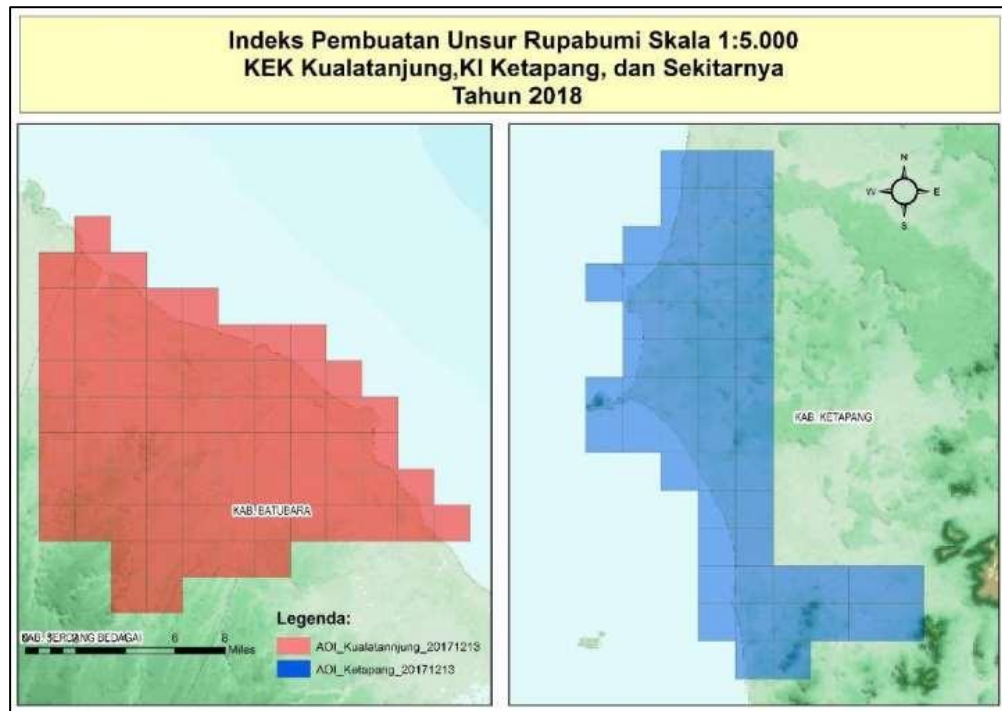
Kontribusi yang diberikan oleh BIG dalam mendukung kegiatan-kegiatan tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) kegiatan utama, yaitu pembuatan model dinamika, pembuatan peta dasar skala besar 1:5000 untuk penyusunan RDTR, serta pembuatan data batimetri dan garis pantai.

Kegiatan pembuatan model dinamika ini bertujuan untuk mengetahui dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan dan Spasial pada wilayah pembangunan. Selain itu juga model dinamika ini bertujuan menyediakan regulasi dan fasilitas untuk mendorong investasi di destinasi pariwisata. Kegiatan ini melakukan integrasi variabel ekonomi, sosial dan lingkungan serta dampak perubahan penggunaan lahan secara spasial yang bertujuan untuk memahami dinamika spasial sumberdaya (alam dan strategis) kawasan strategis pariwisata nasional melalui pemanfaatan IGT untuk mencapai tujuan utama pembangunan. Hasil dari kegiatan ini dapat dilihat pada gambar 3.2.



Gambar 3. 2 Hasil Pemodelan Spasial dengan Menggunakan *Business As Usual* (BAU) dan Skenario Pengembangan Wilayah.

Kegiatan kedua adalah pembuatan peta skala besar 1:5.000 untuk penyusunan RDTR, tujuannya kegiatan adalah menyediakan data dukung pengembangan PN dan sasarannya adalah terselenggaranya layanan bimbingan teknis penyusunan Peta RDTR Kabupaten/Kota di Wilayah PN. *Output* yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah Peta Dasar skala 1:5.000 dan Wilayah Pembinaan Teknis Penyusunan Peta RDTR Kabupaten/Kota. Tahun 2018 telah BIG telah menghasilkan peta dasar skala 1:5.000 sebanyak 780 NLP untuk penyusunan RDTR di sekitar kawasan KEK dan KI, serta kecamatan lokasi prioritas (Lokpri) kawasan perbatasan. Hasil kegiatan ini dapat dilihat pada gambar 3.3.



Gambar 3. 3 Contoh Peta Dasar Untuk Penyusunan RDTR Kawasan KEK dan KI

Selanjutnya pada kegiatan utama yang ketiga yaitu penyediaan data batimetri dan garis pantai. Pada tahun 2018 BIG telah menghasilkan sebanyak 19 NLP Peta Batimetri dengan skala 1:10.000 yang digunakan untuk mendukung pengembangan KEK dan KI wilayah prioritas yang diamanatkan dalam program PN. Pembuatan peta batimetri tersebut dilakukan menggunakan skema survei hidrografi dengan volume pekerjaan sepanjang 22.500 LineKm.

Selain itu pada tahun 2018 BIG memberikan konsultasi teknis kepada 14 provinsi dalam rangka penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP3K). Data batimetri dan garis pantai digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RZWP3K. Daftar provinsi tersebut dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3. 3 Daftar Provinsi yang Memanfaatkan DG dan IG Kelautan dan Lingkungan Pantai dalam Rangka Penyusunan Raperda RZWP3K Provinsi pada Tahun 2018

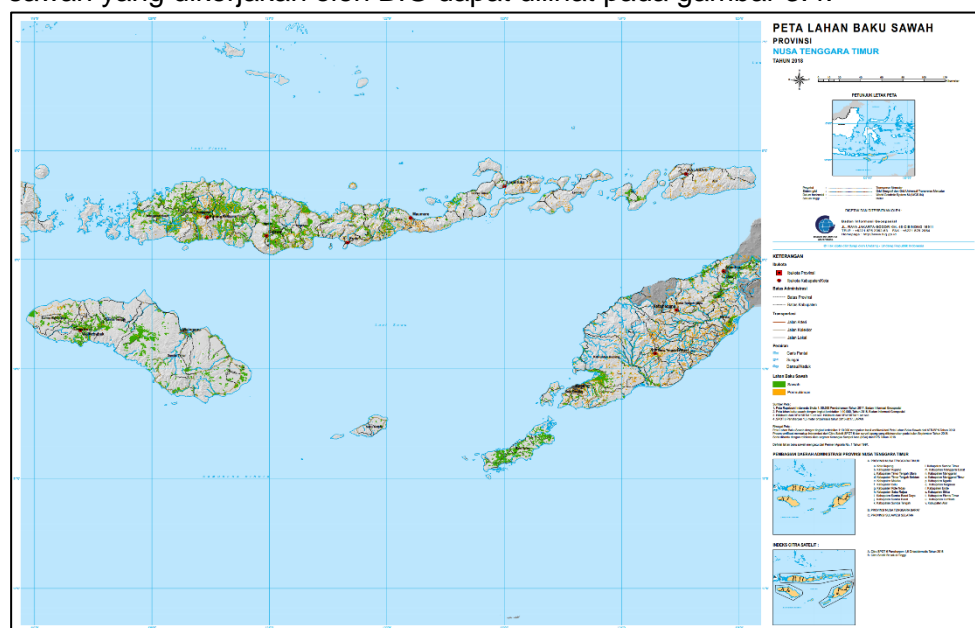
No.	Provinsi	Status	Masukan	Kebutuhan Data
1	Kepulauan Riau	Konsultasi Dokumen Antara dan Rancangan Perda	a. Konfirmasi jumlah pulau b. Konfirmasi panjang garis pantai c. Perbaikan kartografis peta	Peta LPI skala 1:50.000 dan 1:250.000
2	Papua Barat	Konsultasi Teknis Peta Dasar dan Peta Tematik	a. Konfirmasi data batimetri b. Konfirmasi data garis pantai c. Perbaikan kartografis peta	Peta LPI
	Papua Barat	Konsultasi Dokumen Antara	a. Perbaikan pengertian garis pantai pasang tertinggi secara redaksional dalam rancangan Perda pada Bab 1 Pasal 1 ayat 16 b. Konfirmasi jumlah pulau c. Perbaikan kartografis peta	Data garis pantai (KSP 2018)
3	Kalimantan Selatan	Evaluasi Raperda RZWP3K Provinsi Kalimantan Selatan	Pengertian garis pantai pada dokumen Ranperda telah sesuai dengan definisi garis pantai HAT	Peta LPI
4	Prov. Bali	Konsultasi Teknis Peta Dasar	a. Konfirmasi data garis pantai b. Konfirmasi data batimetri	Data garis pantai (KSP 2017)
	Prov. Bali	Konsultasi Dokumen Antara	Perbaikan kartografis peta	Garis Pantai KSP 2017
5	Prov. Kalimantan Timur	Konsultasi Teknis Peta Dasar dan Peta Tematik	a. Konfirmasi data garis pantai b. Perbaikan kartografis peta	Data garis pantai (KSP 2018)
	Prov. Kalimantan Timur	Konsultasi Dokumen Antara	a. Konfirmasi data garis pantai b. Data Bathimetri yang digunakan adalah data dari DISHIDROS AL c. Perbaikan kartografis peta	Garis pantai KSP
6	Prov. Riau	Konsultasi Dokumen Antara	a. Konfirmasi sumber data yang digunakan b. Perbaikan kartografis peta	Data garis pantai (KSP 2017)
7	Jambi	Konsultasi Dokumen Antara	a. Konfirmasi data garis pantai b. Perbaikan kartografis peta	Data garis pantai (KSP 2017)
8	Jawa Tengah	Rapat Evaluasi Ranperda	a. Konfirmasi data garis pantai b. Perbaikan kartografis peta	Data garis pantai LPI tahun 2013
9	Prov. Bangka Belitung	Konsultasi dan koordinasi pansus DPRD Prov. Babel terkait RZWP3K Prov. babel	a. Konfirmasi data pulau, karena terjadi sengketa di gugusan pulau tujuh, menurut hasil verifikasi pulau, pulau tujuh merupakan bagian kabupaten lingga, Prov. Kepri (31 Juli – 2 Agustus 2007). b. Raperda tentang RZWP3K Prov. Babel belum bisa diselesaikan segera karena belum selesainya masalah alokasi wilayah ini.	Garis Pantai KSP
10	Prov. Sulawesi Tenggara	Evaluasi Ranperda RZWP3K Prov. Sulawesi Tenggara	Konfirmasi data pulau, masih ada sengketa pulau Kakabia/ Kawekawea antara Kabupaten Selayar dan Kabupaten Buton Selatan, saat ini masih dalam tahapan identifikasi	Data LPI 2017

No.	Provinsi	Status	Masukan	Kebutuhan Data
			pulau yang dimaksud oleh tim dari BIG.	
11	Jawa Barat	Evaluasi Ranperda	a. Konfirmasi data garis pantai b. Perbaikan kartografis peta	
12	Kalimantan Barat	Evaluasi Ranperda	Tidak ada yang hadir	
13	Kalimantan Tengah	Evaluasi Ranperda	Tidak ada yang hadir	
14	Sumatera Utara	Evaluasi Ranperda	a. Konfirmasi data garis pantai b. Perbaikan kartografis peta	

Sejak tahun 2017 hingga tahun 2018 BIG telah memfasilitasi sebanyak 25 provinsi dari target 34 provinsi dalam rangka pelaksanaan dan evaluasi Raperda RZWP3K provinsi. Dapat disimpulkan bahwa presentase penyelenggaraan IG kelautan oleh K/L/P yang mengacu pada peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) dan peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) hingga tahun 2018 adalah sebesar 73,5%.

### (iii) Ketahanan Pangan

Pelaksanaan PN Ketahanan Pangan juga merupakan salah satu program yang didukung oleh BIG dalam pelaksanaannya, dalam hal ini penyelenggaraan IGT untuk Verifikasi Luas Sawah Baku yang dikerjakan secara bertahap. Dasar hukum kegiatan ini tertuang dalam keputusan rapat nomor B.361/Setwapres/d-2/KH.00.00/03/2017 tanggal 13 Maret 2017 tentang Perbaikan Data Produksi Beras Nasional. Dalam rapat tersebut telah diputuskan bahwa BIG penanggung jawab pelaksana verifikasi lahan sawah nasional bersama dengan LAPAN, Kementerian ATR/ BPN, Kementerian Pertanian, dan BPS. Hasil kegiatan pemetaan lahan baku sawah yang dikerjakan oleh BIG dapat dilihat pada gambar 3.4.



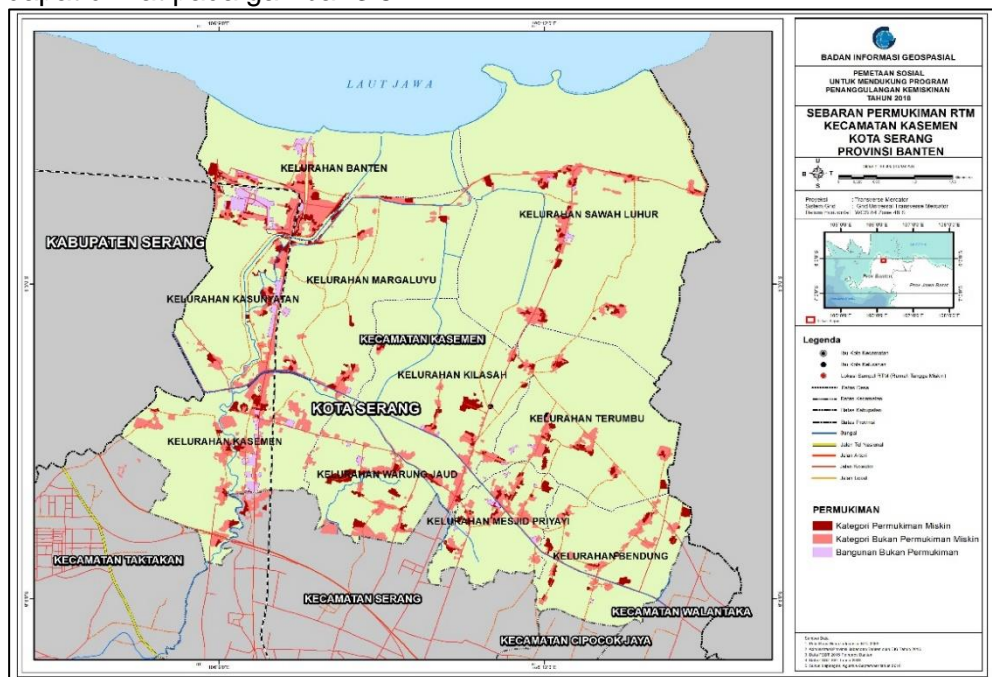
Gambar 3. 4 Contoh Peta Lahan Baku Sawah

Hasil Penyusunan IGT untuk verifikasi luas sawah baku telah digunakan sebagai dasar penetapan luas lahan baku sawah nasional tahun 2018 yang dituangkan dalam Keputusan Menteri ATR/ BPN Nomor 399/KEP-23.3/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2018. Pada tanggal 6 Desember 2018 telah ditandatangani Peta Sawah Beririgasi dan Daerah Irigasi pada 14 Provinsi Lumbung Padi Nasional. Dengan ditetapkannya luas lahan baku sawah nasional ini maka dapat dihitung produksi beras nasional, selain itu data luas lahan baku sawah dapat digunakan untuk mendeteksi adanya konversi sawah.

**(iv) Penanggulangan Kemiskinan**

Pada tahun 2018 BIG juga mendukung PN pada program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk menghasilkan IG dalam bentuk peta-peta tematik berikut informasi deskriptif terkait kondisi geografis, demografis, sosial & ekonomi dan mengintegrasikan data IG dan data statistik dalam format *geodatabase* untuk mendukung penanggulangan kemiskinan. Selain itu kegiatan yang BIG lakukan adalah untuk menyusun kajian secara komprehensif terkait potensi, perencanaan dan karakteristik wilayah untuk penanggulangan kemiskinan.

Lokasi kegiatan dilakukan di Provinsi Jawa Barat dan Banten dan dihasilkan pemetaan dalam bentuk data digital, peta cetak dan kajian yang menjadi masukan penting dalam proses perencanaan penanggulangan kemiskinan pada 2 (dua) provinsi tersebut. Peta yang dihasilkan tersebut juga menjadi salah satu masukan utama dalam mendukung tujuan SDGs yaitu pengentasan kemiskinan, dan menjadi purwarupa bagi daerah dalam melakukan pendataan mandiri tentang kemiskinan. Hasil dari kegiatan ini dapat dilihat pada gambar 3.5.

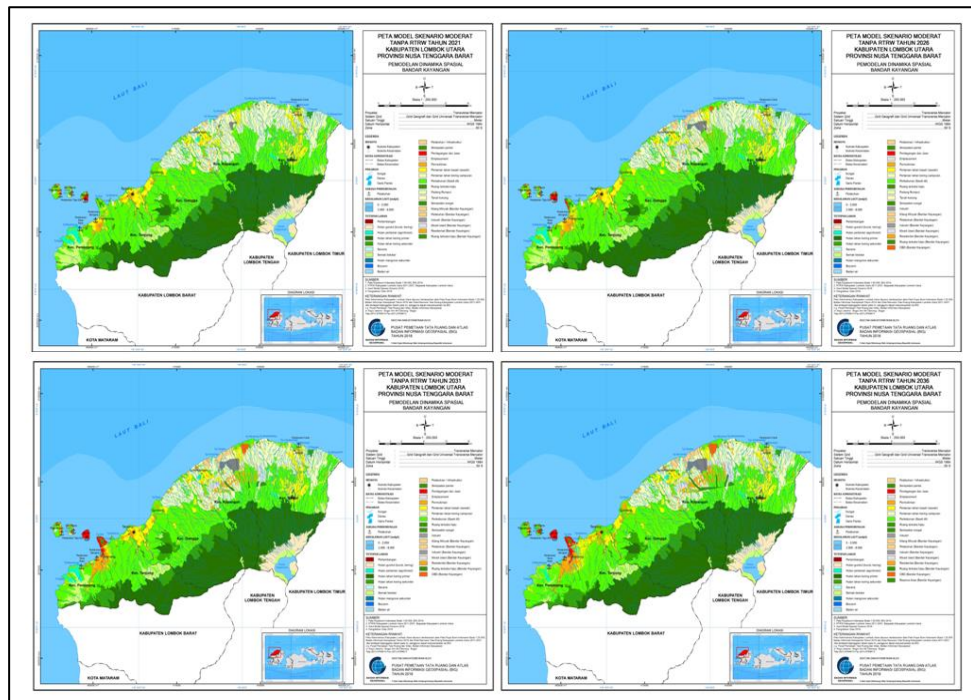


Gambar 3. 5 Peta Sosial Untuk Mendukung Program Penanggulangan Kemiskinan



## (v) Insfratraktur, Konektivitas, dan Kemaritiman

Prioritas Nasional kelima ini BIG berkontribusi dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan konektivitas kelautan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pembuatan Model Dinamika Spasial Global Hub dan Pemetaan Data Batimetri dan Garis Pantai-Konektivitas. Perbedaan dalam kegiatan penyediaan data batimetri ini terletak pada penentuan konektivitas untuk mencapai Global Hub. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan yaitu pada wilayah Bandar Kayangan yang bertujuan untuk mengetahui dampak sosial, ekonomi, lingkungan dan spasial pengembangan Global Hub. Hasil dari kegiatan pemodelan ini dapat dilihat pada gambar 3.6.



Gambar 3. 6 Pemodelan Spasial Kab. Lombok Utara Tahun 2021, 2026, 2031 dan 2036

Hasil pemodelan tersebut digunakan untuk menyusun skenario pengembangan kawasan melalui pemanfaatan IGT menggunakan model sistem spasial dinamis untuk mendukung tujuan utama pembangunan kawasan andalan Bandar Kayangan melalui integrasi variabel ekonomi, sosial, dan lingkungan serta dampak perubahan lahan secara spasial. Pemodelan dinamika spasial kawasan Bandar Kayangan menyajikan perubahan dan prediksi lahan di Kawasan Bandar Kayangan, Kabupaten Lombok Utara dengan beberapa skenario. Sehingga diharapkan *outcome* yang tercapai dari kegiatan ini adalah rekomendasi skenario strategi pengembangan Wilayah Kawasan Bandar Kayangan.

Untuk data batimetri yang digunakan dalam mendukung program PN ini bertujuan untuk dijadikan dasar pembangunan konektivitas Global Hub untuk mengkoneksikan seluruh wilayah laut Indonesia. Sampai tahun 2018 telah dipetakan dipetakan lokasi-lokasi prioritas dalam mendukung tol laut dan pelabuhan utama lainnya dalam mendukung konektivitas antar wilayah

sebesar 27 provinsi dari target 34 provinsi di seluruh Indonesia. Maka presentase data geospasial yang digunakan pada skala 1:10.000 terhadap kebutuhan prioritas nasional sudah mencapai 79,14%.

#### **(vi) Pembangunan Wilayah**

Prioritas nasional keenam yang didukung pelaksanaannya oleh BIG ini dibagi kedalam 5 (lima) kegiatan prioritas, yaitu regulasi kawasan perbatasan, pemerintahan desa, sarana prasarana kebencanaan, penataan ruang dan lingkungan hidup dan penyelesaian konflik, pemilikan tanah serta legalisasi atas tanah objek reforma agraria. Penjelasan dari masing-masing kegiatan prioritas tersebut dijelaskan sebagai berikut:

##### **1. Regulasi Kawasan Perbatasan**

Kegiatan yang dilakukan BIG dalam mendukung kegiatan prioritas ini adalah pembuatan peta dasar skala 1:5.000 untuk penyusunan RDTR kecamatan lokasi prioritas kawasan perbatasan. Kegiatan selanjutnya adalah BIG melakukan pembuatan tanda batas negara yang dilakukan di wilayah perbatasan antara RI – Malaysia, RI – RDTL, dan RI – Papua Nugini. Selain itu juga dilakukan perundingan Batas Darat dan Batas Laut yang dilakukan dalam hal peningkatan dan penguatan regulasi pengelolaan kawasan perbatasan.

##### **2. Pemerintahan Desa**

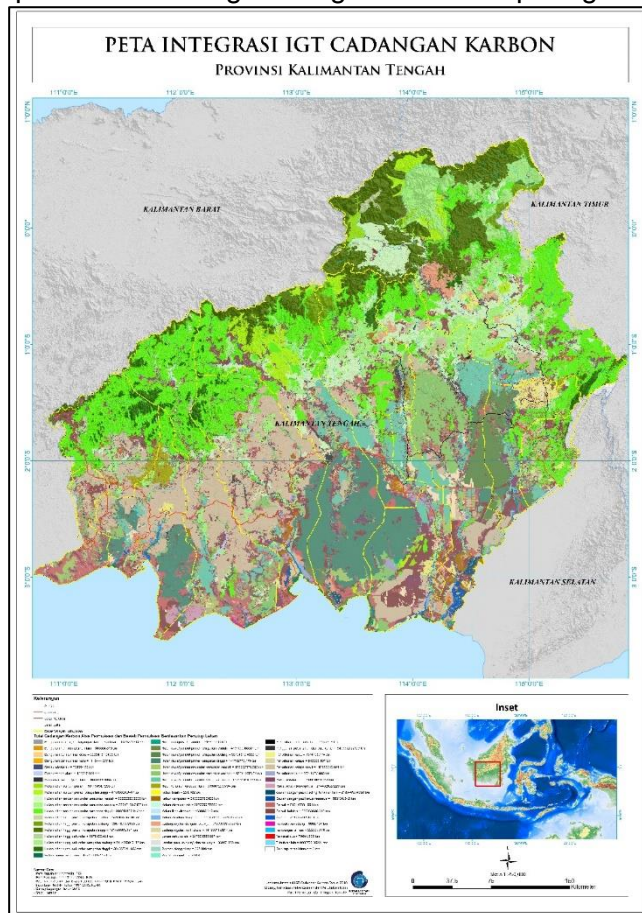
Kegiatan yang dilakukan BIG adalah membuat batas kesepakatan wilayah administrasi desa yang didelineasi secara kartometrik. Pada Tahun Anggaran 2018 BIG telah melaksanakan kegiatan delineasi batas wilayah administrasi desa/kelurahan secara kartometrik tanpa kesepakatan khususnya pada daerah yang belum tersedia Peta Rupabumi Indonesia skala 1:25.000 yaitu pada sebagian besar wilayah di Sumatera, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Target volume kegiatan Batas Kesepakatan Wilayah Administrasi Desa yang Didelineasi Secara Kartometrik tahun 2018 adalah sebanyak 31.147 desa, dengan capaian sebanyak 31.147 desa atau dapat dikatakan telah tercapai 100%.

##### **3. Sarana Prasarana Kebencanaan**

Badan Informasi Geospasial (BIG) membuat Sistem Informasi Rapid Mapping Kebencanaan dan pembuatan Peta Rawan Banjir untuk mendukung kegiatan prioritas ini. Peta Rawan Banjir ditujukan untuk memenuhi kebutuhan daerah mengenai Informasi Geospasial tema kebencanaan untuk menyusun Peta RDTR. Sementara sistem informasi tersebut untuk menyediakan berbagai macam data informasi kebencanaan yang berhasil dihimpun oleh berbagai pihak, terutama instansi pemerintah yang menjadi pemangku kepentingan setiap bencana seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPera), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan *stakeholders*.

4. Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan

Dalam mendukung penataan ruang dan lingkungan hidup berkelanjutan, BIG melakukan kegiatan pemetaan integrasi cadangan karbon. Informasi Geospasial Tematik cadangan karbon lahan gambut yang terdiri atas cadangan karbon permukaan dan cadangan karbon tanah masih menjadi tanggung jawab 2 (dua) Kementerian yang berbeda yaitu Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Kementerian Pertanian. Dalam rangka menjalankan fungsi integrasi beberapa IGT yang dilaksanakan oleh K/L, BIG melakukan proses integrasi dua IGT tersebut supaya menjadi satu kesatuan informasi yang komprehensif tentang cadangan karbon seperti gambar 3.7.



Gambar 3. 7 Peta Integrasi IGT Cadangan Karbon Provinsi Kalimantan Tengah

5. Penyelesaian Konflik, Pemilikan Tanah, serta Legalisasi Objek Reforma Agraria

Dalam rangka penyelesaian konflik dalam sistem agraria, BIG berkontribusi dalam merancang pembuatan portal Kebijakan Satu Peta untuk melakukan kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi agar menghindari adanya tumpang tindih pada konflik agraria. Dengan hal ini maka seluruh Informasi Geospasial yang dihasilkan oleh berbagai instansi dapat disinkronkan dengan mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basisdata dan satu geoportal sehingga tidak terjadi perbedaan atau tumpang tindih informasi. Informasi Geospasial yang ada kemudian dapat diberbagipakaikan dan dimanfaatkan secara

optimal guna mendukung pembangunan nasional sehingga program pembangunan nasional dapat direncanakan dan dilaksanakan secara tepat lokasi dan tepat sasaran. Konsep demikian ini yang kemudian disebut sebagai Kebijakan Satu Peta (KSP). Dengan konsep tersebut maka dibuatlah sebuah Geoportal KSP yang menjadi wadah berbagi data dan informasi geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) yang memuat 85 (delapan puluh lima) peta tematik hasil kegiatan Percepatan Pelaksanaan KSP. Dalam mengatasi adanya konflik kepemilikan dan legalitas hukum pada tanah objek reforma agraria, BIG berkontribusi dalam menyediakan referensi dasar seperti Sistem Referensi Vertikal Nasional (SRVN), Jaringan Kontrol Geodesi dan Geodinamika, stasiun InaCORS baru di beberapa wilayah di Indonesia, serta Simpul Jaringan IG terkait dengan Reforma Agraria.

### **3.2.2. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Mendukung Penyelenggaraan IG**

Sasaran strategis meningkatnya peran serta masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan IG memiliki indikator kinerja yaitu indeks kesadaran kesadaran (*awareness index*) K/L/P/Perguruan Tinggi serta Mitra Pembangunan terhadap perannya dalam mendukung penyelenggaraan IG. Target yang ditentukan dalam pencapaian target pada tahun 2018 adalah sebesar 7 (indeks 1-10). Untuk mengukur ketercapaian indikator kinerja ini dilakukan melalui kegiatan survei kepada responden yang memiliki kriteria dan profil khusus.

Kriteria dan profil yang dimaksud adalah responden yang memang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan IG (*stakeholders* BIG), bukan hanya sekedar pengguna (*users*). *Stakeholders* yang menjadi target untuk dilakukan survei terdiri dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota), Perguruan Tinggi (PTN, PTS dan PPIDS) serta Mitra Pembangunan (NGO/LSM, Perusahaan Swasta di Bidang IG).

Hasil dari pelaksanaan survei ini adalah indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap perannya dalam mendukung penyelenggaraan IG adalah sebesar 6,36 atau 90,86% dari target yang diharapkan. Nilai tersebut mengalami penurunan 0,04 poin dari capaian tahun 2017 yaitu 6,4. Meskipun terjadi penurunan yang tidak terlalu signifikan dari capaian tahun sebelumnya, namun BIG terus berusaha untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan IG dengan berbagai macam kegiatan yang sifatnya edukatif. Misalnya dengan secara rutin melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada masyarakat dan mahasiswa mengenai pentingnya data dan informasi geospasial dalam mendukung perencanaan pembangunan.

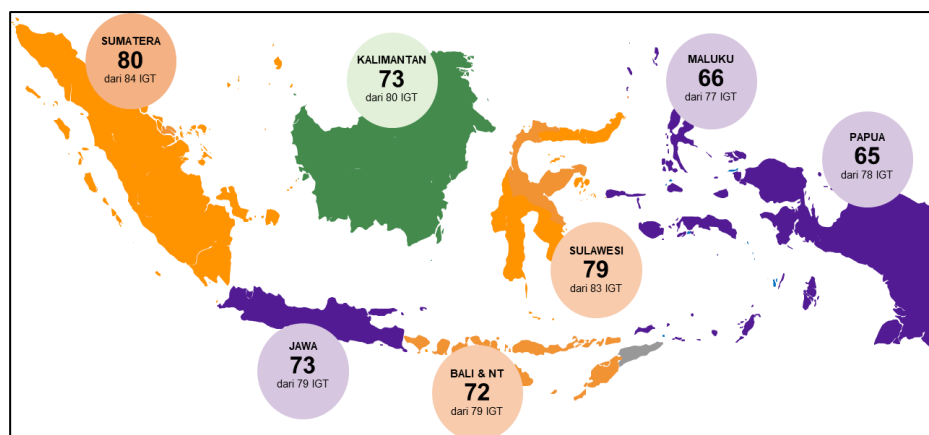
Badan Informasi Geospasial (BIG) yang hingga saat ini masih bermitra dengan Komisi VII DPR-RI secara intensif melakukan kegiatan diseminasi informasi geospasial sepanjang tahun 2018 kepada masyarakat di beberapa daerah yang menjadi wilayah kerja Komisi VII DPR-RI. Kegiatan diseminasi tersebut dimaksudkan untuk memperkenalkan IG dan proses pemanfaatannya dalam setiap sektor pembangunan yang dilakukan pemerintah.

### 3.2.3. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya IG Sektorial Yang Terintegrasi

Sasaran strategis ketiga dari BIG adalah meningkatnya IG sektoral yang terintegrasi. Untuk mengukur sasaran strategis pertama ini yaitu dengan melihat jumlah presentase IG sektoral yang telah terintegrasi (KSP 1:50.000) dengan target sebesar 100% telah terintegrasi. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 serta diperkuat dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2011 maka fungsi BIG tidak lagi hanya melakukan survei dan pemetaan, tetapi dituntut bertindak sebagai perumus dan pengendali kebijakan teknis dan integrator penyelenggaraan IG di seluruh Indonesia. BIG membuat sebuah Geoportal KSP untuk memwadahi berbagi data dan informasi geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) yang memuat 85 (delapan puluh lima) peta tematik hasil kegiatan Percepatan Pelaksanaan KSP. Pelaksanaan Kegiatan PKSP sebagaimana diamanatkan dalam Perpres 9/2016 terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu Kompilasi, Integrasi, dan Sinkronisasi.

Kompilasi merupakan proses pengumpulan data IG Tematik yang dihasilkan oleh Kementerian/Lembaga. Selanjutnya adalah proses integrasi yang merupakan proses penyelarasan IG Tematik yang telah terkompilasi terhadap IG Dasar berupa Peta Rupabumi Indonesia (RBI). Tahapan integrasi ini menjadi tahapan mendasar dalam mewujudkan One Map Policy yang akan mempermudah dalam proses sinkronisasi. Tahap terakhir adalah sinkronisasi yang merupakan proses penyelarasan antar IG Tematik, khususnya IGT-IGT yang memiliki keterkaitan dengan status kepemilikan dan penguasaan serta arahan pemanfaatannya untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih kewenangan dalam penguasaan dan pengelolaan lahan. Ketiga proses ini sangat berpengaruh untuk mengurangi adanya IG sektoral yang ada di setiap instansi pusat ataupun daerah.

Tahun 2018 kegiatan Percepatan KSP fokus pada penyelesaian Kompilasi dan Integrasi di Pulau Jawa, Maluku dan Papua. Capaian Kegiatan PKSP pada tahap Kompilasi secara nasional hingga akhir Tahun 2018 dari 85 tema IGT yang menjadi target telah dilakukan kompilasi dan integrasi sebanyak 83 tema, dimana 2 tema yang belum terkompilasi berupa IGT Rencana Tataruang Laut Nasional (RTRLN) dan IGT Batas Administrasi Desa/Kelurahan. Tingkat capaian integrasi hingga akhir tahun 2018 di wilayah Pulau Kalimantan sebesar 91% (73 dari 80 IGT), Sumatera 95% (80 dari 84 IGT), Sulawesi 95% (79 dari 83 IGT), Bali-NT 91% (72 dari 79 IGT), Jawa 82% (73 dari 79 IGT), Maluku 86% (66 dari 77 IGT) dan Papua 83% (65 dari 78 IGT). Capaian tersebut dihitung secara umum per region/pulau berdasarkan keterintegrasian tema IGT di masing-masing region/pulau. Dengan kata lain secara keseluruhan di wilayah Indonesia telah tercapai sebesar 97,65% peta tematik yang telah dilakukan kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi. Untuk melihat capaian integrasi dari pelaksanaan kebijakan satu peta dapat dilihat pada gambar 3.8.



Gambar 3. 8 Capaian Integrasi Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Hingga Tahun 2018

### 3.2.4. Sasaran Strategis 4: Meningkatkan Kepuasan Pengguna Terhadap Produk dan Layanan BIG

Pada sasaran keempat BIG memiliki IKU yaitu “Indeks kepuasan pengguna terhadap produk dan layanan BIG” dengan target nilai IKM sebesar 3,8 dari 1-5 Skala Likert. Dalam mengukur indikator ini BIG melakukan metodologi survei kepuasan masyarakat dan survei *awareness* terhadap BIG. Sasaran survei ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu pengguna dan non-pengguna layanan IG. Target responden pertama sebagai pengguna layanan IG adalah Kementerian / Lembaga / Instansi Pemerintah / TNI / Polri yang pernah menggunakan layanan IG dari BIG. Sedangkan target pada responden kedua sebagai non-pengguna layanan IG yaitu masyarakat umum dengan menggunakan survei *awareness* IG.

Dalam mengukur kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di BIG ini juga di bagi menjadi beberapa kategori pengguna serta komponen yang di evaluasi masing-masing kategori tersebut. Pengguna produk IG dibagi menjadi pengguna yang memperoleh produk IG secara langsung, secara online, memperoleh dari website BIG, pengguna layanan data Rp 0,- secara langsung ataupun online, serta pengguna layanan IG secara umum. Beberapa komponen yang di evaluasi dari kategori layanan tersebut yaitu seperti prosedur pelayanan, interaksi dengan petugas IG, fasilitas ruang layanan, informasi data, serta kecepatan dan kemudahan memperoleh data. Prosedur pelayanan ini diukur dengan kesesuaian SOP yang berlaku pada pelayanan publik di BIG. Interaksi dengan petugas IG diukur meliputi Daya Tanggap, Kecakapan, dan Kesopanan dari petugas layanan IG. Sedangkan fasilitas ruang layanan diukur dari kenyamanan, kebersihan, dan ketersediaan fasilitas penunjang di ruang layanan.

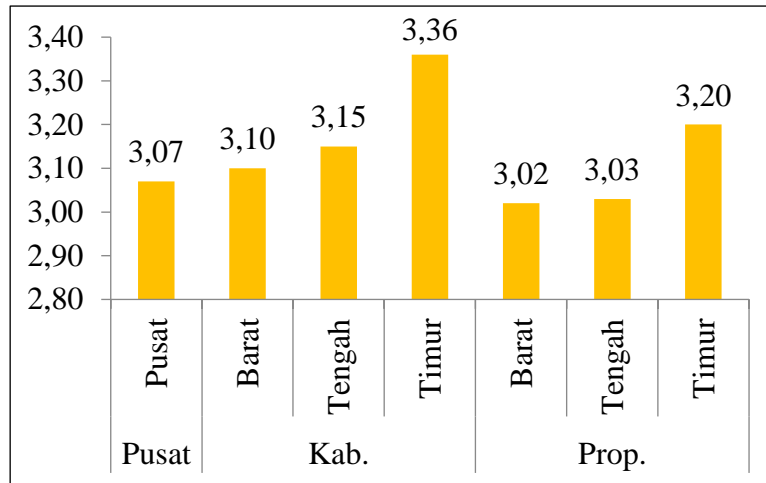
Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam survei ini dilakukan secara sampling dengan menggunakan media kuesioner yang sudah tersusun secara sistematis. Metode sampling ini dibagi menjadi 2 kategori yaitu pertama adalah sampling untuk tingkat kepuasan terhadap layanan dan produk IG dan kedua adalah sampling survei *awareness* IG. Perbedaan dari kedua kategori ini berkaitan dengan target yang menjadi sasaran responden sebelumnya. Sampling pertama diperuntukan untuk pengguna layanan IG dan sampling

kedua diperuntukan untuk non-pengguna layanan IG. Pada metode sampling pertama dibagi menjadi dua yaitu pemilihan objek survei Pusat dan pemilihan objek survei Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pada pemilihan objek survei Pusat menggunakan penarikan contoh acak sederhana atau simple random sampling kepada setiap Kementerian / Badan/ dan Instansi pemerintah pusat lainnya. Sedangkan pada pemilihan objek survei Provinsi dan Kabupaten/Kota menggunakan multistage sampling, yaitu pada level Provinsi menggunakan stratified random sampling dan pada level Kabupaten/Kota menggunakan simple random sampling. Pada sampling survei “awareness” IG ditujukan kepada masyarakat umum yang belum menggunakan produk IG dari BIG namun sudah mengetahui produk IG. Metode yang digunakan dalam survei ini adalah purposive sampling dengan menggunakan kuisioner.

Metode analisis data yang dilakukan dalam mengukur indikator sasaran strategis keempat ini yaitu dengan menggunakan analisis deskriptif, perhitungan nilai indeks kepuasan bagi BIG, perhitungan nilai indeks kepuasan per pusat di BIG, perhitungan nilai indeks kepuasan dan kepentingan per atribut, analisis importance kinerja analysis (IPA) dan customer satisfaction index (CSI). Analisis deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan hasil survei pada kuesioner dari setiap responden. Analisis IPA merupakan analisis yang digunakan untuk melakukan perencanaan strategis peningkatan layanan dengan mengukur hubungan antara harapan dan apa yang dirasakan dari pengguna layanan. Sedangkan analisis CSI adalah metode untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna secara menyeluruh dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dari setiap atribut.

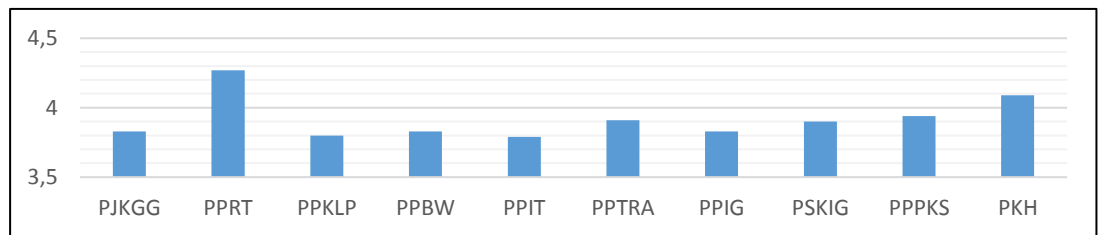
Untuk mengukur capaian sasaran strategis keempat ini BIG menargetkan jumlah responden yang dibutuhkan sekitar 215 responden yang dibagi menjadi 3 level yaitu 15 responden di Pusat, 16 responden di level Provinsi, dan 184 responden di level Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaannya secara keseluruhan terdapat kelebihan jumlah responden untuk responden pengguna layanan IG yang didapat sebesar 434 responden. Jumlah responden ini terdiri dari 165 responden di level Pusat, 144 responden di level Provinsi, 77 responden di level Kabupaten/Kota, serta responden tambahan sebesar 48 responden dari perusahaan dan lainnya. Pada target responden untuk level Pusat dan Provinsi telah melebihi dari jumlah target yang diharapkan, namun pada target responden di level Kabupaten/Kota masih jauh perolehannya yaitu 77 responden target dari 184 responden yang harus dipenuhi.

Hasil dai penilaian IKM yang didapatkan dari pengguna ini bervariasi dan dapat dilihat pada Gambar X. Pada level Pusat didapatkan nilai IKM sebesar 3,07. Untuk level Provinsi dan Kabupaten/Kota ini dibagi menjadi wilayah barat, tengah, dan timur. Pada level Provinsi wilayah barat mendapatkan nilai IKM sebesar 3,02, wilayah tengah sebesar 3,03, dan wilayah timur sebesar 3,20. Sedangkan pada level Kabupaten/Kota di wilayah barat mendapatkan nilai IKM sebesar 3,10, wilayah tengah sebesar 3,15, dan wilayah timur sebesar 3,36. Secara umum nilai IKM pada level Kabupaten/Kota cenderung lebih tinggi dibanding dengan level Provinsi ataupun Pusat. Begitu pula pada wilayah timur yang cenderung lebih tinggi hasil penilaian IKM dibandingkan pada wilayah tengah dan timur.



Gambar 3. 9 Rataan IKM Berdasarkan Kelompok Pengguna Per Wilayah

Selain itu dalam survei ini juga bertujuan menilai tingkat pelayanan dari masing-masing pusat yang ada di BIG. Jika dilihat pada Gambar XX nilai IKM perpusat yang ada di BIG yaitu PJKGG sebesar 3,83, PPRT sebesar 4,27, PKLP sebesar 3,80, PBW sebesar 3,83, PPIT sebesar 3,79, PTRA sebesar 3,91, PPIG sebesar 3,83, PSKIG sebesar 3,90, PPKS sebesar 3,94, dan PKH sebesar 4,09.



Gambar 3. 10 Nilai IKM per pusat di BIG

Dalam survei ini juga dilihat seberapa besar pengguna produk Peta Rupabumi Indonesia dari setiap responden yang didapat. Dari sekitar 434 responden menghasilkan jumlah permintaan Peta RBI sebesar 580 permintaan yang terdiri dari 192 responden yang menggunakan peta RBI skala kecil, 292 responden menggunakan peta RBI skala menengah, dan 96 responden menggunakan peta RBI skala besar. Format peta RBI yang digunakan oleh responden ini pada umumnya berupa file softcopy yaitu dalam format shp/gdb (shapefile/geodatabase) sebanyak 199 responden, selain itu terdapat 130 responden yang mendapatkan peta RBI berupa peta cetak, 99 responden mendapatkan berupa file jpeg/png/pdf, dan 88 responden mendapatkan peta RBI berformat lainnya.

Dalam survei tingkat awareness tidak seluruh responden terlibat dalam survei ini, hanya 170 responden yang dilibatkan dari total 434 responden. Responden yang dilibatkan pada umumnya terdiri dari PNS dan Mahasiswa dan hanya sebagian kecil ASN non PNS dan Swasta. Terdapat 103 responden dari PNS, 48 responden dari mahasiswa, 12 responden ASN non PNS, dan 7 responden dari pihak Swasta. Namun dalam hasil surveinya dari sebanyak 57,65% tidak mengetahui BIG dan sebesar 45,88% telah mengetahui eksistensi BIG. Dari sebesar 45,88% yang telah mengetahui BIG ini terdapat



27,65% telah mengetahui produk BIG dan 18,24% mengetahui layanan BIG. Dari survei ini juga hanya sekitar 60 responden yang menjawab bahwa BIG satu-satunya instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembuatan peta. Sebagian besar sisanya masih belum tahu bahwa BIG adalah instansi pemerintah yang diberikan kewenangan untuk membuat peta dasar.

Nilai IKM pada BIG secara keseluruhan yang telah dilakukan pembobotan yaitu sebesar 3,85 yang terdiri dari nilai IKM pengguna produk sebesar 3,77 dan nilai IKM pengguna layanan BIG sebesar 3,94. Dengan kata lain secara keseluruhan dari nilai IKM BIG dapat disimpulkan bahwa sekitar dari 77% pengguna produk dan layanan IG sudah Puas terhadap pelayanan di BIG. Sehingga dari nilai IKM yang ditargetkan sebesar 3,8 telah tercapai 3,85 dari 1-5 skala likert atau telah terpenuhi sebesar 101,31 % pada tahun 2018.

### 3.2.5. Sasaran Strategis 5: Terwujudnya IG Yang Andal Dalam Mendukung Pembangunan Nasional

Sasaran strategis yang kelima ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja utama, yaitu tingkat keandalan IG dengan target sebesar 8 (indeks 1-10) dan persentase peraturan penyelenggaraan IG (Perka) terkait tupoksi BIG yang tersedia terhadap kebutuhan nasional dengan target 80%. Penjelasan mengenai masing-masing indikator tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Tingkat Keandalan IG

Informasi Geospasial (IG) yang andal sendiri adalah IG yang akurat, mudah diakses dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dapat dihitung dengan mengukur index pemenuhan layanan Ina-Geoportal BIG dan index penerimaan pengguna (*user acceptance*) terhadap Ina-Geoportal. Hasil analisis tingkat keandalan dengan mengukur kedua indeks tersebut dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3. 4 Komponen Penilaian Tingkat Keandalan IG

Kriteria Penilaian	Target		Capaian	
	2017	2018	2017	2018
Indeks pemenuhan layanan INA-Geoportal BIG	6,5	7	9,19	8,96
Indeks penerimaan pengguna ( <i>user acceptance</i> ) terhadap INA-Geoportal	6,5	7	73,85	9

Dari tabel tersebut dapat dilihat capaian indeks pemenuhan layanan INA-Geoportal BIG sedikit menurun pada tahun 2018, sedangkan Indeks penerimaan pengguna (*user acceptance*) terhadap INA-Geoportal meningkat. Untuk target tingkat keandalan sendiri, pada tahun 2018 memiliki target 8. Dari hasil rata-rata capaian kedua index dihasilkan capaian tingkat keandalan adalah 8,98. Target untuk indikator ini dapat dikatakan tercapai dengan realisasi sebesar 112,25%.

2. Persentase Peraturan Penyelenggaraan IG (Perka) Terkait Tupoksi BIG yang Tersedia Terhadap Kebutuhan Nasional

Kebijakan bidang Informasi Geospasial (IG) adalah peraturan penyelenggaraan IG yang relevan dengan kebutuhan penyelenggaraan IG sesuai program prioritas nasional. Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan persentase kebijakan bidang IG yang dibuat dibanding total kebutuhan kebijakan IG. Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 80%. Strategi pencapaian target dilakukan melalui:

a. Dokumen Implementasi SKKNI dan Harmonisasi Profesi Bidang IG (ASEAN)

No	Daftar Dokumen Implementasi SKKNI dan Harmonisasi Profesi Bidang IG (ASEAN) Yang Dibutuhkan
1.	Dokumen Evaluasi Implementasi SKKNI dan KKNi Bidang IG
2.	Dokumen Kebijakan Pengembangan SDM IG
3.	Dokumen Mutual Recognition Agreement (MRA) on surveying dan Implementasinya

Berdasarkan rincian Dokumen Implementasi SKKNI dan Harmonisasi Profesi Bidang IG (ASEAN) yang dibutuhkan, maka rincian Dokumen Implementasi SKKNI dan Harmonisasi Profesi Bidang IG (ASEAN) yang telah disusun sepanjang 2018 adalah sebagai berikut:

No	Daftar Dokumen Implementasi SKKNI dan Harmonisasi Profesi Bidang IG (ASEAN)	Status
1.	Dokumen Evaluasi Implementasi SKKNI dan KKNi Bidang IG	Tersedia
2.	Dokumen Kebijakan Pengembangan SDM IG	Tersedia
3.	Dokumen Mutual Recognition Agreement (MRA) on surveying dan Implementasinya	Tersedia

Berdasarkan tabel di atas, kegiatan penyusunan Dokumen Implementasi SKKNI dan Harmonisasi Profesi Bidang IG (ASEAN) menghasilkan 3 dokumen, sedangkan total kebutuhan sebanyak 3 dokumen.

b. Penyusunan Dokumen Akreditasi dan Sertifikasi Bidang IG

No	Daftar Dokumen Akreditasi dan Sertifikasi Bidang Informasi Geospasial Yang Dibutuhkan
1.	Perubahan Keputusan Kepala BIG Nomor 21.3 Tahun 2017 tentang Standar Persyaratan Peserta Uji Sertifikasi Tenaga Profesional IG
2.	Tata Cara Sertifikasi Penyedia Jasa dibidang Informasi Geospasial
3.	Standar Biaya Sertifikasi Penyedia Jasa di Bidang Informasi Geospasial
4.	Perubahan SK Kepala BIG Nomor 27 tahun 2017 tentang

No	Daftar Dokumen Akreditasi dan Sertifikasi Bidang Informasi Geospasial Yang Dibutuhkan
	Klasifikasi dan Kualifikasi Penyedia Jasa di Bidang IG
5.	Pelaksanaan Akreditasi LPK Tenaga Profesional Bidang IG

Berdasarkan rincian Dokumen Akreditasi dan Sertifikasi Bidang Informasi Geospasial yang dibutuhkan, maka rincian Dokumen Akreditasi dan Sertifikasi Bidang Informasi Geospasial yang telah disusun sepanjang 2018 adalah sebagai berikut:

No	Daftar Dokumen Akreditasi dan Sertifikasi Bidang Informasi Geospasial	Status
1.	Perubahan Keputusan Kepala BIG Nomor 21.3 Tahun 2017 tentang Standar Persyaratan Peserta Uji Sertifikasi Tenaga Profesional IG	Tersedia
2.	Tata Cara Sertifikasi Penyedia Jasa dibidang Informasi Geospasial	Tersedia
3.	Standar Biaya Sertifikasi Penyedia Jasa di Bidang Informasi Geospasial	Tersedia
4.	Perubahan SK Kepala BIG Nomor 27 tahun 2017 tentang Klasifikasi dan Kualifikasi Penyedia Jasa di Bidang IG	Tersedia
5.	Pelaksanaan Akreditasi LPK Tenaga Profesional Bidang IG	Tersedia

Berdasarkan tabel di atas, kegiatan penyusunan Dokumen Akreditasi dan Sertifikasi Bidang Informasi Geospasial menghasilkan 5 dokumen, sedangkan total kebutuhan sebanyak 5 dokumen.

c. Penyusunan Dokumen Pengembangan Kelembagaan dan Simpul Jaringan IG

No	Daftar Dokumen Pengembangan Kelembagaan dan Simpul Jaringan IG Yang Dibutuhkan
1.	Dokumen Penguatan kapasitas dan strategi pelaksanaan Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN)

Berdasarkan rincian Dokumen Pengembangan Kelembagaan dan Simpul Jaringan IG yang dibutuhkan, maka rincian Dokumen Pengembangan Kelembagaan dan Simpul Jaringan IG yang telah disusun sepanjang 2018 adalah sebagai berikut:

No	Daftar Dokumen Pengembangan Kelembagaan dan Simpul Jaringan IG	Status
1.	Dokumen Penguatan kapasitas dan strategi pelaksanaan Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN)	Tersedia

Berdasarkan tabel di atas, kegiatan penyusunan Dokumen Pengembangan Kelembagaan dan Simpul Jaringan IG menghasilkan 1 dokumen, sedangkan total kebutuhan sebanyak 1 dokumen.

d. Penyusunan Dokumen Rancangan SNI Bidang Informasi Geospasial

Pusat Standardisasi dan Kelembagaan IG selaku Sekertariat Komite Teknis 07.01 telah mengusulkan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) tahun 2018 kepada Badan Standardisasi Nasional (BSN), dengan rincian sesuai sebagai berikut:

No	Judul PNPS
1.	Pemetaan biomassa permukaan skala 1:250.000
2.	Pemetaan rawan kebakaran hutan skala 1:250.000
3.	Penyajian peta rupabumi Indonesia – Bagian 1: skala kecil dan menengah

Judul tersebut dalam tabel, telah disetujui dan ditetapkan melalui Rapat Manajemen Teknis Pengembangan Standar (MTPS) BSN sesuai dalam Surat Penyampaian Hasil MTPS Nomor 2268/BSN/D3-d3/8/2018. Rancangan Standar Nasional Indonesia yang telah disusun berdasarkan PNPS 2018, telah tercapai hasil:

No	Judul RSNI	Status RSNI
1.	Pemetaan biomassa permukaan skala 1:250.000	RSNI 3
2.	Pemetaan rawan kebakaran hutan skala 1:250.000	RSNI 3
3.	Penyajian peta rupabumi Indonesia – Bagian 1: skala kecil dan menengah	RSNI 3

Berdasarkan tabel di atas, kegiatan penyusunan Dokumen Rancangan SNI Bidang Informasi Geospasial menghasilkan 3 dokumen, sedangkan total kebutuhan sebanyak 3 dokumen.

Hasil perhitungan target seluruh rumusan kebijakan di bidang IG dibanding total kebutuhan tercapai 100%, artinya semua kebijakan di bidang IG telah disusun sesuai kebutuhan dan melebihi target sasaran strategis tahun 2018.

### 3.2.6. Sasaran Strategis 6: Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi

Dalam melihat keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 4 (empat) indikator kinerja utama, yaitu (1) nilai reformasi birokrasi BIG dengan target sebesar 71; (2) opini penilaian laporan keuangan oleh BPK dengan target sebesar WTP; (3) nilai evaluasi akuntabilitas kinerja dengan target sebesar 68; dan (4) nilai capaian nilai maturitas SPIP (Sistem Pengendalian

Internal Pemerintah) BIG) dengan target sebesar 2,7 (skala 1-5). Keempat indikator kinerja tersebut dinilai oleh pihak eksternal dan berlaku secara nasional, dimana untuk indikator kinerja (1) dan (3) dinilai oleh Kementerian PANRB, indikator (2) dinilai oleh BPK dan indikator (4) dinilai oleh BPKP. Penjelasan masing-masing indikator kinerja tersebut disampaikan sebagai berikut:

#### 1. Nilai Reformasi Birokrasi BIG

Salah satu kondisi perlu dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional adalah membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi, sesuai amanat dalam Nawacita butir 2 dalam RPJMN 2015-2019. Reformasi Birokrasi bertujuan membangun pemerintahan berbasis kinerja dan pemerintahan dinamis. Capaian atas tujuan tersebut ditunjukkan dengan terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel, serta mampu memenuhi *public needs* dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Nilai kinerja RB BIG diperoleh dari indeks RB hasil penilaian KemenPAN & RB) terhadap 8 (delapan) Area Perubahan RB, yaitu: (i) manajemen perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur; birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi; (ii) peraturan perundang-undangan; regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif; (iii) organisasi; yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*); (iv) tata laksana; sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*; (v) sdm aparatur; sdm aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera; (vi) akuntabilitas; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; (vii) pengawasan; meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; (viii) pelayanan publik; pelayanan prima yang sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Target RB BIG tahun 2018 berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disepakati adalah sebesar 71, sementara hingga saat penyusunan laporan kinerja ini diselesaikan KemenPAN&RB belum mengeluarkan penilaian RB untuk tahun 2018. Maka capaian masih menggunakan nilai tahun sebelumnya yaitu tahun 2017. Adapun rincian penilaian RB BIG dapat dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 3. 5 Rincian Penilaian RB BIG

No.	Kriteria	Nilai Maks	Nilai 2017
<b>I. KOMPONEN PENGUNGKIT</b>			
1.	Manajemen Perubahan	5	3.48
2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5	2.71
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	6	3.01
4.	Penataan Tatalaksana	5	3.21
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15	11.99
6.	Penguatan Akuntabilitas	6	3.38
7.	Penguatan Pengawasan	12	6.71
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6	3.99
	<b>Total Komponen Pengungkit</b>	<b>60</b>	<b>38.48</b>
<b>II. KOMPONEN HASIL</b>			
1.	Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20	13.22
2.	Pemerintah yang bersih dan bebas KKN	10	7.99
3.	Kualitas Pelayanan Publik	10	8.25
	<b>Total Komponen Hasil</b>	<b>40</b>	<b>59.46</b>
	<b>Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi</b>	<b>100</b>	<b>67.94</b>

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan sementara bahwa indikator kinerja ini belum memenuhi target atau baru tercapai sebesar 95,69% dari target yang ditentukan sebesar 71.

## 2. Opini Atas Laporan Keuangan

Laporan keuangan BIG merupakan bentuk pertanggungjawaban BIG atas pelaksanaan APBN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK melakukan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Opini terhadap laporan keuangan penyelenggara negara bertujuan mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. BPK telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Informasi Geospasial TA 2017 dengan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian yang berarti disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sedangkan untuk Laporan keuangan Badan Informasi Geospasial TA 2018 pemeriksaan baru akan berjalan di Bulan Januari 2019 sehingga untuk Laporan Keuangan Badan Informasi Geospasial TA 2018 belum memperoleh opini dari BPK.

Maka untuk melihat ketercapaian indikator kinerja ini menggunakan penilaian tahun 2017, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa realisasi indikator kinerja ini adalah 100%. Opini WTP merupakan hal yang sangat penting karena memberikan gambaran tingkat kewajaran dan akuntabilitas pengelolaan dana publik yang terwujud pada suatu laporan keuangan. Untuk mempertahankan opini tersebut BIG harus dapat melakukan perbaikan proses manajemen dan menjaga kualitas pengelolaan anggaran

dan penyusunan laporan keuangan, serta menindaklanjuti rekomendasi BPK atas kekurangan yang ada.

### 3. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Sesuai amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), BIG telah melakukan implementasi atas SAKIP dengan melaksanakan perencanaan strategis, penetapan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta revidi dan evaluasi kinerja. Pada tahun 2018, BIG telah melakukan berbagai langkah perbaikan dalam implementasi SAKIP, utamanya terkait pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja serta pelaporan kinerja.

Nilai Akuntabilitas Kinerja BIG atau biasa disebut sebagai Nilai SAKIP diperoleh dari evaluasi tahunan yang dilakukan oleh Kementerian PAN & RB dalam rangka melakukan pemantauan terhadap pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Hasil evaluasi tahunan yang dilakukan oleh KemenPAN&RB menunjukkan bahwa BIG telah melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan menunjukkan capaian kinerja yang baik diiringi dengan penggunaan anggaran dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang terukur.

Untuk penilaian AKIP tahun 2018 belum dikeluarkan oleh Kementerian PANRB, sehingga untuk mengukur capaian indikator kinerja ini menggunakan hasil penilaian tahun 2017. Hasil evaluasi yang dilakukan menghasilkan nilai AKIP di lingkungan BIG adalah sebesar 63,61 dengan predikat B. Adapun rincian penilaian atas evaluasi yang dilakukan oleh KemenPAN&RB dapat dilihat pada tabel 3.6.

Tabel 3. 6 Rincian Penilaian AKIP BIG

Komponen Penilaian		Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	18.84
b.	Pengukuran Kinerja	25	15.51
c.	Pelaporan Kinerja	15	10.15
d.	Evaluasi Internal	10	6.17
e.	Capaian Kinerja	20	12.94
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100</b>	<b>63,61</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>B</b>	

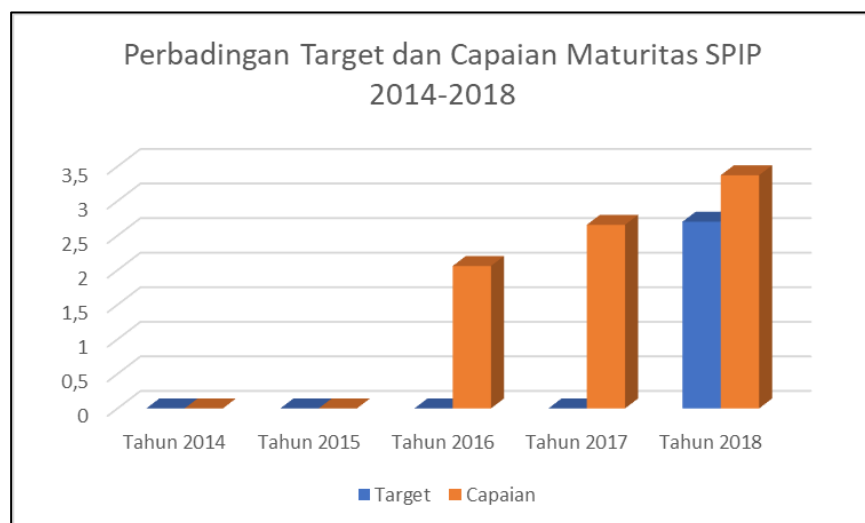
Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 93,54% dari target yang ditentukan sebesar 68.

#### 4. Nilai Maturitas SPIP

Tingkat Maturitas penyelenggaraan SPIP di BIG tahun 2018, berdasarkan hasil self assessment oleh assessor BIG, berada pada level 3 tepatnya 3,373 dengan kategori level “Terdefinisi”. Pengukuran ini dilakukan oleh Assesor BIG terhadap 25 fokus penilaian maturitas SPIP, dan masih dalam proses validasi oleh BPKP. Penjelasan atas level maturitas SPIP BIG Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Telah menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian untuk kegiatan pokok unit organisasi di Badan Informasi Geospasial sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008;
- b. Telah mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur pengendalian atas kegiatan pokok unit organisasi di Badan Informasi Geospasial;
- c. Telah melaksanakan kebijakan dan prosedur pengendalian atas kegiatan pokok unit organisasi di Badan Informasi Geospasial dan mendokumentasikannya secara konsisten;
- d. Belum sepenuhnya melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian atas beberapa kegiatan pokok unit organisasi di Badan Informasi Geospasial secara terdokumentasi dan berkala;
- e. Belum sepenuhnya melakukan pemantauan yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan beberapa kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer.

Melalui hasil pengukuran diketahui bahwa, capaian nilai maturitas SPIP BIG tahun 2018 telah melampaui target yang telah ditetapkan, dimana capaian maturitas BIG tahun 2018 adalah 3,373, sedangkan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 adalah sebesar 2,7 atau realisasi kinerjanya adalah sebesar 124,93%. Grafik perbandingan target dan capaian maturitas SPIP dari tahun ke tahun dapat dilihat pada gambar 3.11.

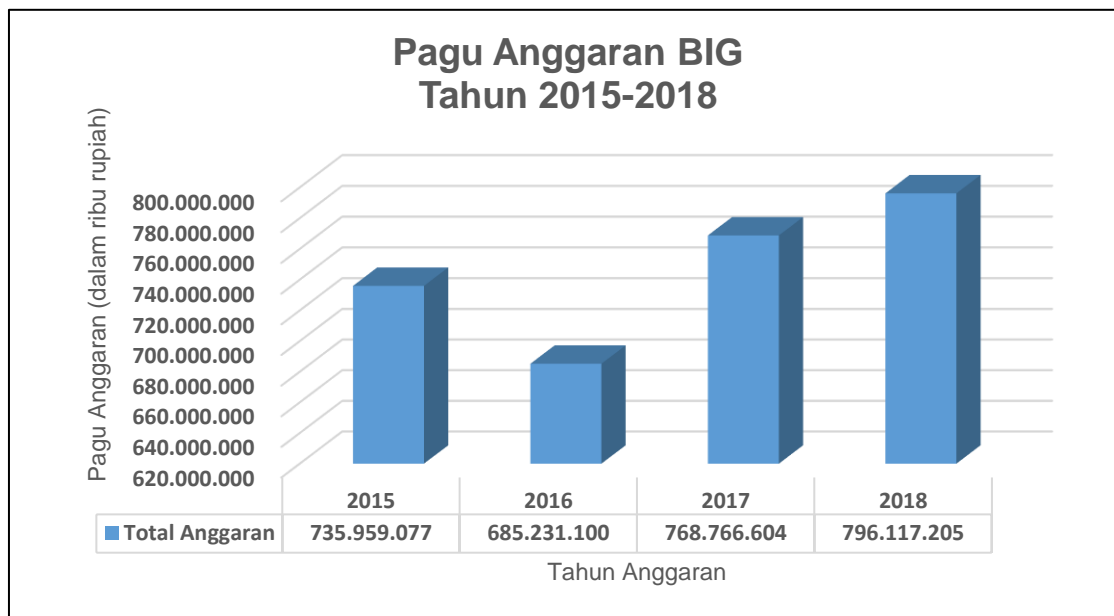


Gambar 3. 11 Grafik Capaian Maturitas BIG Tahun 2014-2018



### 3.3. Kinerja Anggaran

Pagu anggaran BIG mulai dari tahun 2015-2018 terus mengalami kenaikan. Namun mengalami penurunan di tahun 2016, karena adanya revisi anggaran sebesar Rp.180.306.544.000,.-. Nilai pagu anggaran BIG TA. 2015-2018 dapat dilihat pada gambar 3.12.



Gambar 3. 12 Pagu Anggaran BIG Tahun 2015-2018

Selama periode 2018, BIG telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 5 (lima) kali. Rincian pelaksanaan revisi anggaran adalah sebagai berikut :

1. Revisi DIPA pertama dilaksanakan dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran belanja TA.2018, percepatan kinerja Badan Informasi Geospasial (BIG), percepatan penyelesaian kegiatan Kebijakan Satu Peta, peningkatan Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Informasi Geospasial di Daerah, dan penyelesaian tunggakan untuk pekerjaan di Tahun Anggaran 2017. Pada revisi ini terdapat perubahan prioritas penggunaan anggaran yang mengakibatkan pergeseran anggaran antar kegiatan pada Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial (083.01.06) dalam 1 (satu) Satker yang sama. Revisi ini diajukan ke Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan disahkan oleh DJA pada tanggal 22 Mei 2018;
2. Revisi DIPA kedua diusulkan karena adanya perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran berubah (perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBPN) sebesar Rp 4.000.000.000,-. Revisi ini diajukan ke Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan disahkan oleh DJA pada tanggal 15 Agustus 2018;
3. Revisi DIPA ketiga dilaksanakan dalam rangka mempercepat pencapaian kinerja Badan Informasi Geospasial baik dalam bentuk realisasi fisik maupun realisasi anggaran dan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas belanja dalam rangka penggunaan anggaran yang terbatas. Revisi ini diajukan ke Direktur

Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pelaksanaan Anggaran dan disahkan pada tanggal 24 September 2018;

4. Revisi DIPA keempat diusulkan karena adanya perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran berubah (perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBPN) sebesar Rp. 1.240.130.000,- dan revisi administratif (perubahan Pejabat Penandatanganan DIPA dan perubahan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)). Revisi ini diajukan ke Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan disahkan oleh DJA pada tanggal 23 Oktober 2018; dan
5. Revisi DIPA terakhir dilaksanakan dalam rangka penugasan terkait penanganan pasca bencana di Sulawesi Tengah. Revisi ini diajukan ke Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan disahkan oleh DJA pada tanggal 9 November 2018.

Secara keseluruhan total penyerapan BIG Tahun 2018 adalah 88,12%, lebih kecil dari realisasi tahun 2017 yang mencapai 92.57%. Kendala yang dihadapi dalam penyerapan anggaran tersebut antara lain :

1. Target PNBPN dapat direalisasikan 91,73% dari pagu anggaran Rp. 11.640.130.000,-;
2. Realisasi Belanja Pegawai sebesar 91,23%, ini dikarenakan antara lain pada saat penyusunan anggaran belanja pegawai TA.2018 sudah memasukkan anggaran terkait kenaikan tunjangan kinerja (dari 60% ke 70%) sebesar 10% yang dianggarkan, tetapi tidak dapat direalisasikan pada tahun anggaran 2018 karena belum diterbitkannya Peraturan Presiden tentang Kenaikan Tunjangan Kinerja tersebut; dan
3. Realisasi Belanja Modal pada TA 2018 mengalami penurunan sebesar 7,77% dibandingkan TA 2017 disebabkan karena :
  - a. Nilai sisa kontraktual yang tidak direvisi karena termasuk output Prioritas Nasional;
  - b. Adanya sisa lelang kegiatan kontraktual yang menggunakan anggaran belanja modal dan kapitalisasi belanja modal yang tidak bisa dialihkan ke kegiatan lain; dan
  - c. Paket pekerjaan konsultan yang gagal lelang dialihkan menjadi swakelola tipe 2. Hal ini berakibat anggaran tidak terealisasi optimal karena harga satuan untuk gaji personil swakelola tipe 2 lebih rendah dibanding dengan kontraktual, tidak ada keuntungan perusahaan dan pajak-pajak yang semula dialokasikan untuk pihak konsultan dan jumlah waktu pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perencanaan.

Untuk melihat ralisasi anggaran BIG tahun 2018 per kegiatan (unit kerja eselon II) dapat dilihat pada tabel 3.7.

Tabel 3. 7 Realiasi Anggaran Per Unit Kerja Eselon II BIG Tahun 2017

No.	Kode   Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi
1	3535 Pengelolaan Urusan Umum dan Keuangan	124,908,004,000	111,949,625,241	89.63
2	3536 Penyelenggaraan Perencanaan, Kepegawaian dan Organisasi, serta Hukum	19,634,961,000	19,010,808,408	96.82

No.	Kode   Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi
3	3538  Pengawasan Pendayagunaan Aparatur Negara	4,137,297,000	3,713,627,635	89.76
4	3539 Penyelenggaraan Penelitian, Promosi, Kerja Sama serta Layanan Jasa dan Produk	30,037,032,000	28,297,462,984	94.21
5	3540 Pemetaan Tata Ruang dan Atlas	30,545,340,000	26,049,084,377	85.28
6	3541 Pembangunan Jaringan Kontrol Geodesi dan Geodinamika	148,611,144,000	127,560,176,785	85.83
7	3543 Pemetaan Batas Wilayah	46,972,210,000	42,948,456,730	91.43
8	3544 Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai	42,839,765,000	38,478,042,953	89.82
9	3545 Pemetaan Rupabumi dan Toponim	170,172,013,000	154,136,663,099	90.58
10	3546 Penyelenggaraan Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial	14,673,530,000	13,886,748,863	94.64
11	3547 Pemetaan dan Integrasi Tematik	76,397,860,000	56,422,243,394	73.85
12	3548 Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial	87,188,049,000	74,283,442,497	85.30
<b>Jumlah</b>		796,117,205,000	696,482,054,399	88.12

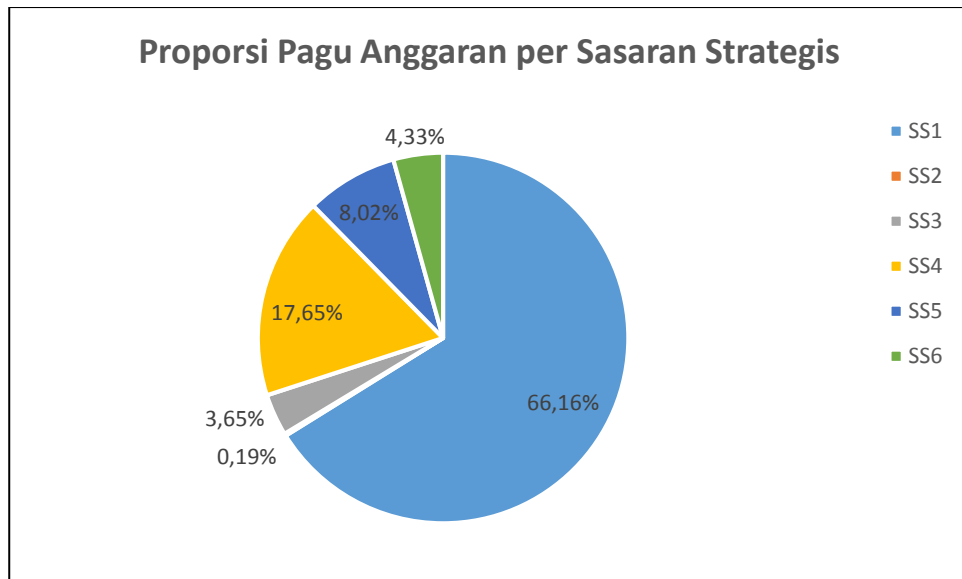
Sementara untuk melihat capaian anggaran yang dikaitkan dengan setiap sasaran strategis BIG tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.8.

Tabel 3. 8 Keterkaitan Sasaran Strategis dengan Realisasi Anggaran BIG Tahun 2018

Kode	Sasaran Strategis	Indikator	Pagu	Realisasi	%
SS1	Meningkatnya kontribusi IG sesuai kebutuhan pembangunan Nasional dan Masyarakat	1   Persentase IG yang tersedia sesuai kebutuhan terhadap total kebutuhan IGD terkait pembangunan nasional dan masyarakat	526,700,253,000	459,157,454,167	87.18
SS2	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan IG	2   Indeks kesadaran K/L/P, PT dan Mitra Pembangunan (awareness index) terhadap perannya dalam mendukung	1,545,050,000	800,695,400	51.82

Kode	Sasaran Strategis	Indikator		Pagu	Realisasi	%
			penyelenggaraan IG			
SS3	Meningkatnya IG sektoral yang terintegrasi	3	Persentase IG sektoral yang terintegrasi (KSP 1:50.000)	29,022,938,000	24,702,814,538	85.11
SS4	Meningkatnya kepuasan pengguna produk dan layanan BIG	4	Indeks kepuasan pengguna terhadap produk dan layanan BIG	140,528,409,000	126,916,934,592	90.31
SS5	Terwujudnya IG yang andal dalam mendukung pembangunan nasional	5	Tingkat keandalan IG	63,873,689,000	57,652,125,426	90.26
		6	Persentase peraturan penyelenggaraan IG (Perka) terkait tupoksi BIG yang tersedia terhadap kebutuhan nasional			
SS6	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi	7	Nilai Reformasi Birokrasi BIG	34,446,866,000	32,176,170,078	93.41
		8	Opini penilaian laporan keuangan oleh BPK			
		9	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja			
		10	Nilai Capaian Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) BIG			
<b>TOTAL</b>				<b>796,117,205,000</b>	<b>696,482,054,399</b>	<b>88.12</b>

Dari capaian anggaran per sasaran strategis dapat dilihat bahwa semua kegiatan dan output di BIG mendukung sasaran strategis BIG, artinya anggaran di BIG cukup efisien. Sasaran strategis “Meningkatnya kontribusi IG sesuai kebutuhan pembangunan Nasional dan Masyarakat” memiliki proporsi anggaran >50% dari total pagu BIG. Hal ini dikarenakan tugas dan fungsi BIG sebagai penyedia data IG. Proporsi terbesar kedua pada sasaran strategis “Meningkatnya kepuasan pengguna produk dan layanan BIG”, hal ini dikarenakan prioritas perspektif BIG adalah peningkatan pada stakeholder dan customer. Diagram proporsi penganggaran setiap sasaran terhadap total pagu BIG dapat dilihat pada gambar 3.13



Gambar 3. 13 Diagram Proporsi Anggaran per Sasaran Strategis

Diharapkan kedepannya anggaran setiap sasaran strategis dapat dialokasikan secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan dan prioritas lembaga. Sesuai arahan pemerintah bahwa skema penganggaran adalah *money follow program*. Sehingga setiap kegiatan yang dikerjakan tepat guna dan sesuai arah perencanaan pembangunan.

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja BIG Tahun 2018 merupakan gambaran kinerja dari seluruh unit kerja di BIG termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2018. Dalam rencana kinerja tahun 2018 ditetapkan sebanyak 6 (enam) sasaran strategis dan 10 (sepuluh) indikator kinerja. Secara umum capaian sasaran strategis tersebut telah menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik dengan capaian sasaran strategis mencapai 102,39%.

Laporan Kinerja tahun 2018 ini merupakan tanggung jawab BIG sebagai instansi yang fungsinya menyelenggarakan kegiatan Informasi Geospasial di Indonesia, yang dituangkan kedalam Rencana Strategis, Sasaran Strategis hingga Indikator Kinerja Utama. Dalam hal ini BIG telah memenuhi setiap target kinerja yang telah ditetapkan, walaupun masih ada beberapa IKU yang belum tercapai secara maksimal. Hal tersebut senantiasa membuat BIG untuk selalu melakukan perbaikan serta mengevaluasi terkait IKU dan target yang ada untuk dirumuskan menjadi rencana aksi agar tahun berikutnya dapat mencapai target kinerja secara maksimal.

Dalam rangka peningkatan kinerja BIG, semua informasi kinerja yang dituangkan didalam LAKIN BIG 2018 ini akan menjadi bahan perbaikan untuk menjadi *trigger* bagi seluruh pegawai BIG dalam mengimplementasikan kinerjanya untuk mendukung IKU organisasi. Kami menyadari bahwa kinerja BIG masih belum sempurna, untuk itu pada tahun 2019 ini akan dilakukan penyempurnaan manajemen kinerja BIG dengan melakukan *cascading* Indikator Kinerja Utama hingga level individu dan menetapkan Indikator Kinerja yang bersifat *outcome*.

Akhir kata dengan disusunnya LAKIN BIG 2018 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada *stakeholder* dan masyarakat mengenai tugas dan fungsi BIG yang sebetulnya sangat strategis dalam mendukung penyusunan perencanaan pembangunan nasional. Senantiasa *feedback* kami harapkan dari para *stakeholder* demi perbaikan kinerja kedepannya, sehingga BIG semakin dirasakan keberadaan dan manfaatnya oleh masyarakat dengan memberikan pelayanan secara maksimal dan profesional.